

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KELURAHAN
SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

**NAMA : ANDY ABDILLAH
NPM : 177121036
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN
WARGA (PMB-RW) DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

TESIS

Oleh :

**ANDY ABDILLAH
NPM : 177121036**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TIM PENGUJI**

Ketua



Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Drs. Parjiyana, M.Si

Anggota



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

TESIS

NAMA : ANDY ABDILLAH
NPM : 177121036
Bidang Kajian Utama : ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I
Pekanbaru, Oktober 2019



Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, Oktober 2019



Lilis Suriani, S. Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau



Lilis Suriani, S. Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andy Abdillah**
NPM : **177121036**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Jenjang Pendidikan : **Strata Dua (S.2)**
Judul Penelitian : **Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Andy Abdillah



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 227 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

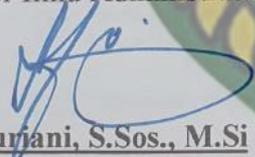
Nama : Andy Abdillah
NPM : 177121036
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 30 September 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi


Lilis Surjani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 1 Oktober 2019

Staff Perpustakaan




Samardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 613/KPTS/PPs-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- bang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- gat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/ri Andy Abdillah tanggal 02 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menunjuk :

| No | Nama | Jabatan Fungsional | Bertugas Sebagai |
|----|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si | Lektor | Pembimbing I |
| 2 | Lilis Suriani, S.Sos., M.Si | Lektor | Pembimbing II |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ANDY ABDILLAH**
 N P M : **177121036**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis : **"ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"**.

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 08 Oktober 2019

Direktur,



Dr. Ir. Saipul Bahri.,M.Ec.
 NPK. 92 11 02 199

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,** dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si dan Ibu Lilis Suriani, S. Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ayahanda Drs. H. Aslimuddin dan Ibunda Tengku Damaiyanti tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya serta seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

6. Calon Istri tersayang Yuni Syaraswati, S.Psi atas motivasi, dan kasih sayang memberikan semangat, kesabaran dan cinta kasih yang tak terhingga.
7. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
9. Kepala Bidang Perekonomian dan Pemerintahan, Kasubbid Perekonomian dan Investasi Bappeda Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dalam wawancara untuk melengkapi data penelitian;
10. Camat Tampan, Lurah dan Staf di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam wawancara untuk pengumpulan bahan penelitian;
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, Amin.

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis,

ANDY ABDILLAH

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh : Andy Abdillah

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) memiliki tujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang sifatnya hanya stimulus saja dari pemerintah untuk memancing partisipasi masyarakat agar aktif dalam program unggulan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, sebab penilaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan penelitian yang terkait antara antara berhasil tidaknya program tersebut. Informan penelitian ini sebanyak 15 (lima belas) orang. Teknik analisis data yang digunakan analisis data dijalankan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan triangulasi serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara umum, hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru *cukup terlaksana* tetapi belum maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru yang menjadi dasar pelaksanaan PMB RW tersebut. Dari *indikator Sosial dan kependudukan* dapat dilihat bahwa program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan perubahan sosial masyarakat tidak begitu berpengaruh, karena kegiatan dalam Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan hanya Program yang bersifat pembelajaran dasar/ pelatihan saja. Sedangkan dilihat dari *aspek ekonomi produktif*, bahwa pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW. Selanjutnya dilihat dari *aspek penataan kawasan dan lingkungan* bahwa program penataan Kawasan dan Lingkungan di Kelurahan Sidomulyo Barat dapat dilihat dari gerakan gotong royong, Penghijauan dan taman bunga. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat yaitu Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi Pelaksanaan sehingga partisipasi tenaga pendamping dan ide gagasan berjalan sesuai keinginan masyarakat. Sehingga berlangsungnya keadilan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW.

Kata kunci : *Pemberdayaan, Masyarakat, Rukun Warga (RW)*

**ANALYSIS OF COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM BASED ON
CITIZENSHIP (PMB-RW) IN KELURAHAN SIDOMULYO BARAT
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

ABSTRACT

By : Andy Abdillah

The Community-Based Community Empowerment Program (PMB RW) has the aim of creating and improving the quality of community life, both individually and in groups which are just a stimulus from the government to encourage community participation to be active in the Pekanbaru City Government's flagship program. This study aims to determine and analyze the implementation of a Community-Based Community Empowerment Program (PMB-RW) in Sidomulyo Barat Village, Tampan District, Pekanbaru City. This research is descriptive qualitative, because the evaluation of the implementation of community empowerment programs is a research that is related between the success or failure of the program. The informants of this study were 15 (fifteen) people. Data analysis techniques used in data analysis were carried out using data reduction, data presentation, and triangulation as well as drawing conclusions / verification. In general, the results of the study explained that the implementation of Community-Based Community Empowerment (PMB-RW) in Tampan Subdistrict, Sidomulyo Barat Village Pekanbaru City was quite implemented but not yet maximal and not in accordance with the Pekanbaru Mayor Regulation which became the basis for the RW PMB implementation. From the social and population indicators it can be seen that the PMB-RW program in Sidomulyo Barat Sub-district of Tampan Sub-district has no significant social change, because the activities in the PMB-RW Program in West Sidomulyo Sub-District of Tampan Sub-District are only Programs that are basic learning / training. While viewed from the aspect of productive economics, that the implementation of the PMB-RW Program in Tampan Sub-District, Sidomulyo Barat Village has not improved or changed the social life of the people who are participating in PMB-RW activities. Furthermore, it is seen from the aspect of regional and environmental structuring that the Regional and Environmental structuring program in the West Sidomulyo Village can be seen from the mutual cooperation, Greening and flower garden movements. Factors affecting the implementation of the Community-Based Community Empowerment Program (PMB-RW) in Sidomulyo Barat Village are Participation in the form of funds and energy / ideas in the form of ideas and justice. Funds for the implementation of activities that will affect the implementation so that the participation of assistants and ideas runs according to the wishes of the community. So that justice takes place in the PMB-RW Program Implementation.

Keywords: Empowerment, Community, Citizens Association (RW)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 21 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 22 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 24 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka..... | 24 |
| 2.1.1 Konsep Administrasi Publik..... | 24 |
| 2.1.1.1 Teori Administrasi Publik..... | 29 |
| 2.1.2 Konsep Kebijakan..... | 30 |
| 2.1.3 Konsep Pelaksanaan..... | 33 |
| 2.1.4 Konsep Organisasi | 35 |
| 2.1.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat..... | 38 |
| 2.1.5.1 Pengertian Pemberdayaan | 38 |
| 2.1.5.2 Pengertian Masyarakat..... | 44 |
| 2.1.6 Teori Pemberdayaan Masyarakat..... | 49 |
| 2.1.6.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat..... | 54 |
| 2.1.6.2 Tahap Pemberdayaan Masyarakat | 56 |
| 2.1.6.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat..... | 57 |
| 2.1.7 Program PMB RW Kota Pekanbaru..... | 60 |
| 2.1.7.1 Pengertian Program | 60 |
| 2.1.7.2 Strategi Pelaksanaan PMB RW..... | 62 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 Kerangka Pemikiran | 64 |
| 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu..... | 64 |
| 2.4 Konsep Operasional | 67 |
| 2.5 Operasional Variabel | 71 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 72 |
| 3.1 Tipe / Jenis Penelitian | 72 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 73 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data..... | 73 |
| 3.4 Informan Peneliti | 74 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 76 |
| 3.6 Analisa Data..... | 77 |
| BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... | 79 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru | 79 |
| 4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kota Pekanbaru | 79 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru | 82 |
| 4.1.3 Geografis dan Pemerintahan Kota Pekanbaru | 84 |
| 4.2 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru | 88 |
| 4.2.1 Gambaran Umum..... | 88 |
| 4.2.2 Visi dan Misi..... | 90 |
| 4.2.3 Tugas, Pokok dan Fungsi | 91 |
| 4.2.4 Sumber Daya Manusia..... | 93 |
| 4.3 Kelurahan Sidomulyo Barat..... | 94 |
| 4.3.1 Gambaran Umum..... | 94 |
| 4.3.2 Visi dan Misi..... | 95 |
| 4.3.3 Kondisi Geografis..... | 95 |
| 4.3.4 Sumber Daya Manusia..... | 97 |

| | |
|--|------------|
| BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN | 99 |
| 5.1 Penyajian Data Informan..... | 99 |
| 5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 101 |
| 5.3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru | 144 |
| BAB VI PENUTUP..... | 148 |
| 6.1 Kesimpulan | 148 |
| 6.2 Saran..... | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA | 152 |
| LAMPIRAN | 151 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1.1. | : Kegiatan PMB RW di Kelurahan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018..... | 14 |
| 1.2. | : Program/ Kegiatan Pemberdayaan Rukun Warga Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018..... | 18 |
| 1.3. | : Kegiatan PMB RW Berbentuk Fisik di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018..... | 20 |
| 2.1. | : Hasil Penelitian Terdahulu..... | 65 |
| 2.2. | : Operasional Variabel..... | 71 |
| 3.1. | : Informan Penelitian..... | 75 |
| 4.1. | : Jumlah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, Penduduk dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2016– 2017..... | 85 |
| 4.2. | : Data Kecamatan Tampan..... | 90 |
| 4.3. | : Jumlah Pegawai pada Kecamatan Tampan Tahun 2019..... | 93 |
| 4.4. | : Jumlah Fasilitas di Kelurahan Sidomulyo Barat..... | 97 |
| 4.5. | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 98 |
| 4.6. | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Status ASN..... | 98 |
| 5.1. | : Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin | 99 |
| 5.2. | : Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan | 100 |
| 5.3. | : Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Umur | 101 |
| 5.4. | : Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Ketua RW Berdasarkan Aspek Sosial dan Kependudukan..... | 111 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 5.5. | : Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Masyarakat/Peserta Berdasarkan Aspek Sosial dan Kependudukan..... | 113 |
| 5.6. | : Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Masyarakat/Peserta Berdasarkan Aspek Ekonomi Produktif..... | 125 |
| 5.7. | : Tahap Pembentukan LKM RW..... | 127 |
| 5.8. | : Dana Operasional PMB RW Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru..... | 134 |
| 5.9. | : Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Ketua RW Berdasarkan Aspek Penataan Kawasan lingkungan..... | 131 |
| 5.10. | : Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Masyarakat/peserta Berdasarkan Aspek Penataan Kawasan lingkungan..... | 144 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 2.1. Kerangka Pikiran Tentang Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru | 64 |
| 5.1 Siklus Program PMB-RW | 127 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembang misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yaitu upaya untuk selalu melakukan pembangunan diberbagai sektor baik itu berupa fisik maupun non fisik.

Pemerintahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan program unggulan nawacita, dimana yang menjadi tiga pokok utama nya yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sektor ekonomi. Sejalan hal tersebut pemerintah menyediakan berbagai kebijakan dengan sasaran nya yaitu kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga didalamnya kebijakan-kebijakan lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju moderitas dalam rangka

pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menurut keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan tidak saja dalam arti pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik sehingga tujuan rakyat Indonesia yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun Pemerintah itu sendiri. Salah satu program Pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-Pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung dari segi potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Maka dari itu dikeluarkan lah keputusan walikota dengan program PMB-RW.

Pemberdayaan masyarakat menurut Aziz, dkk (2005:136) merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk

meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-meneru, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Mardikanto (2013:161) menjelaskan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

- a) Pendekatan partisipatif, dalam arti dapat selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
- b) Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memebrikan manfaat terhadap perbaikan mutu hifup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.
- c) Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya.

Provinsi Riau, merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang memiliki 12 (dua belas) kabupaten dan kota. Sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya, Provinsi Riau juga memiliki letak yang strategis yakni dilintas negara-negara melayu serumpun, dengan ibukota Provinsi Riau adalah di Kota Pekanbaru. Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Provinsi tidak akan terlepas dari arah dan kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Pasal 10 menjelaskan: bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa Kelurahan merupakan

perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota di Provinsi Riau memiliki memiliki 12 daerah kecamatan dan 83 daerah kelurahan yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat dalam pembangunan berbagai bidang, membuat kota ini harus siap menghadapi segala bentuk resiko yang akan muncul, salah satunya mengenai kemiskinan perkotaan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai merupakan salah satu solusi dalam upaya menjawab permasalahan kemiskinan perkotaan. Pemerintah Kota Pekanbaru harus mampu menyusun kebijakan dan program yang tepat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Fakta ini selanjutnya direspon oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Kota Pekanbaru.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) yang dulunya dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bertujuan menciptakan dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan terkait upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) memiliki tujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Berbagai macam produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pun menjadi rujukan program PMBRW. Diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJPD, Perda Nomor 07 Tahun 2017 tentang RPJMD, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW), Perwako Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW), Perwako Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Limpahan Kewenangan Kepada

Kecamatan, Perwako Nomor 20 Tahun 2019 Ttg Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program PMBRW. Setelah merujuk kepada regulasi di atas, maka untuk teknis operasional diatur dengan melalui Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Kota Pekanbaru, selanjutnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Pekanbaru Kepada Camat Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukuk Warga.

Adanya petunjuk umum dan petunjuk teknis sebagai pelaku PMB-RW senantiasa berpedoman kepada Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dengan tujuan mempermudah langkah awal dalam mewujudkan *Smart City Pekanbaru*, dengan kegiatan Tridaya sehingga bisa menjawab enam indikator Smart City yaitu *Smart Governance, Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living* dan *Smart Mobility*; bisa tercapai. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2018 tentang Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga, menerangkan bahwa:

“Kegiatan PMB-RW merupakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan di Kecamatan dan Kelurahan”

Selanjutnya dalam Pasal 2 Perwako tersebut menjelaskan bahwa:

“Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat untuk kegiatan PMB-RW adalah Kegiatan Non Fisik yang meliputi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat, pengadaan

bibit/benih, dan pengadaan peralatan olahraga yang dibutuhkan masyarakat dengan kebutuhan dana tidak lebih dari Rp. 25.000.000,-, sedangkan untuk Kegiatan Fisik seperti Revitalisasi Posyandu, Balai Desa, Poskamling, semenisasi Jalan, pembuatan sumur bor, drainase dan sebagainya dengan maksimal dana juga Rp. 25.000.000,-.”

Dasar Hukum Program PMB RW Sementara penggunaan dana program PMB RW sendiri mengacu kepada lima strategi dasar pembangunan Kota Pekanbaru menuju terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Kelima strategi dasar yang dimaksud di antaranya:

1. Untuk penataan ruang kota.
2. Melakukan pembenahan infrastruktur dasar.
3. Penerapan pendekatan kota modern, smart city, lifeindo city, green city dan lainnya.
4. Pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam Pekansikawan.
5. Terakhir untuk pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari PMB RW Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Kota Pekanbaru didalam Pasal 2 dijelaskan Tujuan dan Sasaran PBM RW sebagai berikut:

Tujuan program PMB - RW Kota Pekanbaru adalah:

- 1) Membangun Tata Nilai melayu dari kebijakan dan kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru;
- 2) Menemukaenali Kota Pekanbaru;
- 3) Program PMB RW bertujuan menjabarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJMD;
- 4) Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani di mulai dari Rukun Warga (RW);
- 5) Memberdayakan Kelembagaan Rukun Warga sebagai penanggungjawab program PMB RW

- 6) Mengurangi jumlah angka kemiskinan per jiwa melalui pemberdayaan social, ekonomi dan penataan kawasan permukiman di lingkungan Rukun Warga.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa **Sasaran PMB-RW Kota Pekanbaru** adalah :

- 1) Kecamatan yang menjalankan Visi Misi Kota Pekanbaru;
- 2) Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru;
- 3) Bersedia/ telah melaksanakan proses siklus PMB RW dengan benar;
- 4) Memiliki Kader Pembangunan Masyarakat (KPM);
- 5) Memiliki Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW);
- 6) Memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) untuk perencanaan tahunan.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat fokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di tingkat RW masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang tepat adalah melalui Program PMB–RW Kota Pekanbaru.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) pada prinsipnya merupakan upaya pemerintah untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya masyarakat akan timbul peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dilaksanakan pertama kali di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2014. Kecamatan Tenayan Raya menjadi pilot project pelaksanaan PMB-RW yang dilaksanakan pada tahun 2014 dan disalurkan ke 93 RW.

Rukun Warga merupakan pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau Lingkungan. Rukun Warga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1987, Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 9 Kelurahan Yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
5. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
6. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
7. Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
8. Kelurahan Tuah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Tuah Karya)
9. Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya).

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Tujuan dari Program PMB RW di Kecamatan Tampan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum

miskin dan memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan Sasaran PMB RW di Kecamatan Tampan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta membenahan lingkungan. PMB RW diharapkan mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program PMB RW merupakan program bagus yang bisa meringankan beban masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dengan program ini, masyarakat kelompok usaha kecil bisa dimudahkan melalui pinjaman modal dari dana PMB RW.

Masyarakat di Kecamatan Tampan banyak menggeluti usaha kecil menengah, namun tidak bisa dikembangkan karena terbentur modal. Maka dengan adanya bantuan Pemko Pekanbaru melalui PMB RW itu sangat membantu sekali di dalam mengembangkan usaha. Untuk mewujudkannya, maka perlu dimulai dari tingkat RW. Camat Tampan juga mengajak perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Tampan menjadi donatur dalam program yang bertujuan melakukan percepatan Pembangunan di Kota Pekanbaru tersebut.

Adapun program dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dilaksanakan di Kecamatan Tampan terdiri dari:

1. Aplikasi Arsip Digital di Kecamatan Tampan

Arsip Digital Adalah sebuah aplikasi yang mengolah data untuk mengarsipkan dokumen-dokumen fisik menjadi dokumen digital yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Dengan aplikasi ini memudahkan bagi pihak yang membutuhkan data dokumen yang terkait dengan Kecamatan Tampan.

2. Website

Dalam rangka publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran Kecamatan Tampan dalam melaksanakan pelayanan, maka diluncurkanlah Website Kecamatan Tampan sehingga masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sektor Kecamatan.

3. E-Schedule

Inovasi ini merupakan aplikasi yang berisi jadwal tentang kegiatan Camat Tampan selama 1 (satu) bulan. Masyarakat umum dapat melihat jadwal Camat Tampan dengan mengakses ke: tampan.pekanbaru.go.id

4. BuTri

Setiap warga / pemohon yang datang ke kantor camat akan langsung menemukan perangkat BuTri. Warga / pemohon tinggal mengambil nomor antrian dan selanjutnya tinggal menunggu panggilan yang mana nomor antrian juga akan tertera di layar monitor.

5. Kelompok Sadar (Pokdar) Kantibmas

Inovasi ini terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Program pokok POKDAR :

- a) Menjadikan tiap Anggota Pokdar jadi Polisi untuk dirinya sendiri, keluarganya serta Lingkungannya.
- b) Mencegah serta menangkal segala bentuk gangguan kantibmas di lingkungan masing-masing.
- c) Merupakan Agen yang Penanggulangan Bencana Alam, serta darurat.

6. E-Pelayanan

Warga yang akan mengurus Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Form KTP, Form KK, Pengurusan pindah, Surat Permohonan Menikah langsung mendownload di website Kelurahan Simpang Baru www.SimpangBaru.Pekanbaru.Go.Id, maka akan tersedia blangko pengurusan yang dibutuhkan. Selain untuk mendapatkan blangko pengurusan, masyarakat juga bias langsung memberikan pertanyaan, komentar dan saran kepada pihak Kelurahan Simpang Baru melalui chat langsung.

7. Rumah Kompos

Inovasi ini merupakan proses pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Inovasi ini berasal dari Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

8. Kecamatan Tampan Peduli

Inovasi ini merupakan bentuk kepedulian Camat terhadap warga masyarakat yang memiliki kehidupan dibawah rata-rata. Setiap 1 bulan sekali Camat akan turun langsung ke rumah warga dengan membawa bantuan seperti sembako dan uang. Selain memberi bantuan, Camat juga menerima keluhan dan berupaya mencari solusi bagi yang bersangkutan.

Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pengamatan peneliti yaitu belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan pada Pelaksanaan program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat belum tercapai dengan baik. Kegiatan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat hanya berlangsung sebentar saja. Kegiatan tersebut hanya berupa pelatihan. Selanjutnya pada tabel berikut dirincikan bentuk program dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dilaksanakan di masing-masing Kelurahan Kecamatan Tampan Tahun 2018 yaitu:

Tabel 1.1
Kegiatan PMB RW di Kelurahan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Tahun 2018

| No | Kelurahan | Kegiatan PMB RW | Sasaran |
|----|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kelurahan Tuah Karya | 1. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah (RW 5, 7 dan 9) 2. Pelatihan Menjahit (RW 2, 8, 9, 11, 12, 13 dan 16) 3. Semenisasi Jalan | 70 orang 20 orang 5 RW |
| 2. | Kelurahan Delima | 1. Pelatihan Tata Boga (RW 1, 2, 03, 4, 5, 6 dan 7) 2. Pelatihan Menjahit (RW 2, 3 dan 5) 3. Pelatihan Perbengkelan Motor (RW 3 dan 7) 4. Pelatihan Daur Ulang (RW 1, 2, 4, 6 dan 7) | 70 orang 30 orang 30 orang 20 orang |
| 3. | Kelurahan Sidomulyo Barat | 1. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah (RW 11, 7, 9 dan 19) 2. Pelatihan Menjahit (RW 3, 8, 9, 12, 14 dan 16) 3. Pelatihan Tata Boga (RW 1, 3, 04, 5, 11, 14 dan 17) 4. Pelatihan Pembuatan Kompos (RW16) | 70 orang 35 orang 20 orang 10 orang |
| 4. | Kelurahan Air Putih | 1. Pelatihan Tata Boga (RW 8, 9, dan 4) 2. Pelatihan Menjahit (RW 1 dan 6) | 20 orang 30 orang |
| | | 3. Pelatihan Hidroponik (RW 3 dan 9) 4. Pelatihan Kerajinan Tangan (RW 2, 3, 4, 5, dan 6) | 20 orang 20 orang |
| 5. | Kelurahan Binawidya | 1. Pelatihan Tata Boga (RW 8, 9, dan 4) 2. Pelatihan Menjahit (RW 1 dan 6) 3. Pelatihan Hidroponik (RW 3 dan 9) 4. Pelatihan Servis HP (RW 5, dan 7) 5. Semenisasi Jalan 6. Drainase | 30 orang 20 orang 20 orang 20 orang 4 RW 5 RW |
| 6. | Kelurahan Sialang | 1. Semenisasi 2. Drainase | 12 RW 2 RW |
| 7. | Kelurahan Tuah Madani | 1. Pelatihan Tata Boga (RW 1, 2, 3,4,5,6 dan 7) 2. Pelatihan Menjahit (RW 2, 3 dan 5) 3. Pelatihan Rebana (RW 6,2 dan 5) 4. Pelatihan perbengkelan motor (RW 3, dan 7) | 30 orang 20 orang 30 orang 50 orang |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------------|--|--|
| 8. | Kelurahan Tobek Gadang | 1. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah (RW 5, dan 7) 2. Pelatihan Menjahit (RW 2, 10 11, dan 12) 3. Pelatihan Daur Ulang (RW 1,2 ,4 ,6 ,7 dan 14) 4. Pelatihan Tata Busana (RW 12 dan 13) | 50 orang 20 orang 20 orang 20 orang |
| 9. | Kelurahan Simpang Baru | 1. Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah (RW 4, 7 dan 9) 2. Pelatihan Menjahit (RW 1,5,6,10,8,9 dan 4) 3. Pelatihan Pembibitan Jamur Tiram (RW 7) 4. Pelatihan Deain Grafis (RW 4 dan 7) | 30 orang 35 orang 20 orang 20 orang |

Sumber: Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 2019.

Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan adalah Kelurahan Sidomulyo Barat yang dijadikan lokus pada penelitian ini dengan alasan dipilihnya Kelurahan Sidomulyo Barat pada lokasi penelitian ini karena telah melaksanakan pelaksanaan PMB-RW, adanya organisasi dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat pada kelurahan ini, akan tetapi pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program dan memiliki keterampilan sesuai dengan konsep pemberdayaan. Dalam pemahaman masyarakat bukan harapan memiliki keterampilan baru yang pada akhirnya memberikan perubahan dari sisi ekonomi lebih mandiri namun kenyataannya kegiatan ini seperti tidak tepat sasaran baik dari pelatihan bengkel motor, bengkel las, tata boga, membatik dan lain-lain.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat lokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat dilevel RW/RT masih mengalami

kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, adapun tahapan pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh kelurahan sidomulyo barat yaitu:

1. Sosialisasi
2. Pembentukan LKM –RW
3. Perencanaan program/ kegiatan
4. Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan ini selalu terjadi kendala dalam kegiatan PMBRW.

Sedangkan organisasi pelaksana terdiri dari:

1. Tim koordinasi kota
2. Tim koordinasi kecamatan
3. Tim pendamping
4. Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM-RW)

Fenomena yang terjadi dalam program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai wilayah yang telah melaksanakan pelaksanaan PMB-RW tersebut, yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap masyarakat belum maksimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program dan memiliki keterampilan sesuai dengan konsep pemberdayaan. Dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan tentunya sangat diharapkan nanti akan mendapatkan manfaat dan tujuan dari pemberdayaan, yaitu:

- 1) Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha bersama, kelompok usaha bersama yang sebelumnya kita memberi pengertian akan manfaatnya jika mampu menjadi orang yang mandiri;

- 2) Memberdayakan potensi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif. *Home industry* yang menjadi sasaran terdekat, ditambah dengan potensi lokal yang harusnya bisa lebih berdaya guna untuk masyarakat.
- 3) Memberi alternatif usaha pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 4) Membekali masyarakat dengan informasi–informasi untuk memiliki jiwa kewirausahaan.

Salah satunya, program PMBRW di Kelurahan Sidomulyo Barat yaitu berupa pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Lingkungan. Sumber Dana PMBRW yaitu dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau dan APBN, Dana *Cooperate Social Responsibility* (CSR), dana lain yang tidak mengikat yang diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dana PMB RW, bisa juga digunakan untuk kegiatan simpan pinjam di tengah masyarakat serta untuk pembangunan fisik yang dianggap mendesak. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Mekanisme penyelenggaraan program PMB-RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan. Adapun Penyusunan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Rukun Warga (RKP-RW) sebagai berikut:

Tabel 1.2
Program/ Kegiatan Pemberdayaan Rukun Warga Di Kecamatan
Tampn Kota Pekanbaru Tahun 2018

| PROGRAM/ KEGIATAN | KELURAHAN | JUMLAH KEGIATAN | | REALISASI | | JUMLAH ANGGARAN | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|------------------|
| | | Fisik | Non Fisik | Fisik | Non Fisik | DPA | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Pelatihan- Pelatihan | 1. Simpang Baru | 0 | 9 | 0 | 9 | Rp.233.456.250,- | Rp.233.456.250,- |
| | 2. Tuah Karya | 5 | 12 | 0 | 8 | Rp.435.294.500,- | Rp.228.742.000,- |
| | 3. Delima | 0 | 7 | 0 | 7 | Rp.187.876.000,- | Rp.187.876.000,- |
| 2. Pengadaan Kontruksi Jalan | 4. Sidomulyo Barat | 9 | 12 | 0 | 5 | Rp. 532.500.000,- | Rp.153.625.000,- |
| | 5. Sialangmunggu | 15 | 9 | 0 | 4 | Rp.604.088.250,- | Rp.156.410.750,- |
| 3. Pengadaan Kontruksi Jaringan Air | 6. Tobekgodang | 0 | 10 | 0 | 7 | Rp.235.425.000,- | Rp.174.372.000,- |
| | 7. Airputih | 1 | 7 | 0 | 4 | Rp.199.390.000,- | Rp.108.912.500,- |
| | 8. Binawidya | 2 | 7 | 0 | 4 | Rp.225.390.000,- | Rp.109.412.500,- |
| | 9. Tuahmadani | 0 | 6 | 0 | 6 | Rp.162.578.500,- | Rp.162.578.500,- |

Sumber : Kantor Kecamatan Tampn, 2018.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, timbul permasalahan bahwa adanya program atau kegiatan yang berbentuk fisik disetiap kelurahan di Kecamatan Tampn tidak dilaksanakan sama sekali, hal ini mengakibatkan Kegiatan PMB RW belum terlaksana dengan baik.

Model proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) dalam penelitian ini, adalah :

1. menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat yang akan penting mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki peserta dari

program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

2. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan (*empowering*) peserta dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.
3. melindungi masyarakatnya secara aktif (*protection*), baik secara fisik maupun non fisik artinya disini dituntut peran ketua RT lingkungan kerjanya harus tanggap terhadap yang dibutuhkan masyarakatnya di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

Dari observasi awal peneliti melihat bahwa Program PMB RW tersebut sifatnya hanya stimulus saja dari pemerintah untuk memancing partisipasi masyarakat agar aktif dalam program unggulan Pemerintah Kota Pekanbaru ini. Sejauh ini sudah beberapa RW penerima program yang telah mempersiapkan wadah berbentuk koperasi dalam pelaksanaan program. Namun harus diingat bahwa anggaran yang nanti diterima hanya sebagai pemancing partisipasi masyarakat untuk juga aktif menjadi bagian dari program. Adapun fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan PMB RW pada Kecamatan Tampan yaitu:

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap masyarakat belum sepenuhnya dimengerti dan diterima oleh

masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program kegiatan, dan tidak untuk memiliki keterampilan yang akan membuka peluang usaha dari keterampilan mereka tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan;

2. Sulitnya mengkoordinir warga masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat untuk melakukan kegiatan PMB RW karena adanya kesibukan sebagai masyarakat terhadap pekerjaan masing-masing, sehingga tidak semua program dapat terlaksanakan;
3. Tidak dijalankannya program PMB RW yang berbentuk pembangunan fisik, seperti Pengadaan Kontruksi Jalan dan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air pada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Kegiatan PMB RW Berbentuk Fisik di Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru Tahun 2018

| No | Kelurahan | Kegiatan PMB RW | Sasaran | Keterangan |
|----|-----------------|--------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tuah Karya | Seminisasi | RW 18, RW 1, RW 3, RW 7 dan RW 15 | Tidak terlaksana |
| 2. | Binawidya | Seminsasi | RW 5, RW 22, RW 25 dan RW 15 | Tidak Terlaksana |
| | | Pembuatan Drainase | RW 01, 19, 21, 22 RW 02, 03, 04 RW 05,07, 08 dan RW 11, 18. | Tidak Terlaksana |
| 3. | Sialangmunggu | Seminsasi | RW 5, RW 22, RW 25 dan RW 15 | Tidak Terlaksana |
| | | Pembuatan Drainase | RW 25 dan RW 26 | Tidak Terlaksana |
| 4. | Sidomulyo Barat | Seminsasi | RW 01, RW 05, RW 11 dan RW 19 | Tidak Terlaksana |
| | | Pembuatan Drainase | RW 04, RW 07 dan RW 12 | Tidak Terlaksana |

Sumber : Kantor Kecamatan Tampan, 2018.

4. Hasil dari kegiatan pelatihan program PMB-RW seperti pelatihan tata boga, menjahit, pelatihan Hidroponik, pelatihan Kerajinan Tangan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan terhadap masyarakat tidak dilanjutkan sebagai pengembangan usaha, hanya sekedar pelatihan saja sehingga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program dan memiliki keterampilan sesuai dengan konsep pemberdayaan.

Dari latar belakang diatas terlihat belum adanya progres dalam program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari latar belakang masalah diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut. Maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang **“Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam rangka penelitian ini adalah tentang bagaimana program dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam rangka penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

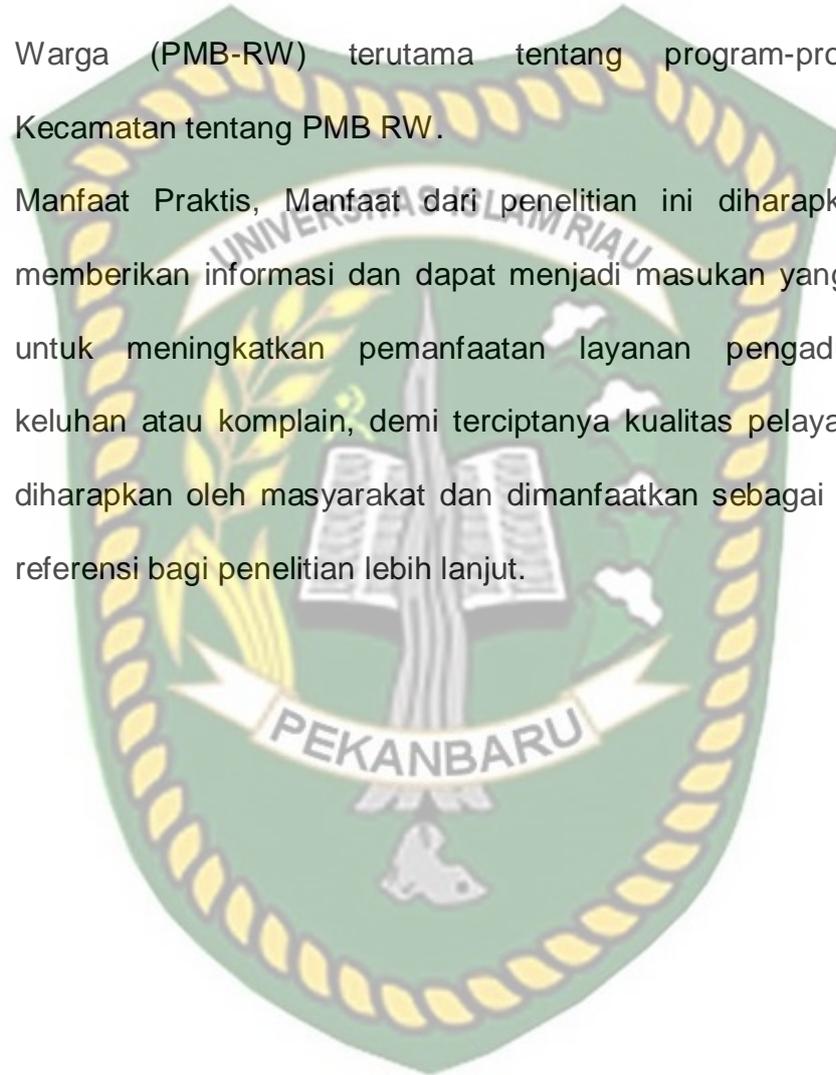
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

2. Manfaat Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) terutama tentang program-program di Kecamatan tentang PMB RW.
3. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pemanfaatan layanan pengaduan atas keluhan atau komplain, demi terciptanya kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori tentang kebijakan, pelaksanaan program, Pemberdayaan Masyarakat serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

2.1.1. Konsep Administrasi Publik

Menurut Nawawi (Syafii, 2013:5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (Afiffudin, 2010:4) Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Zulkifli (Sedarmayanti, 2010:12) bahwa konsep administrasi diidentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam study administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai

rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja samasejumlah di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diartikan administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit dimana cakupan tersebut merupakan suatu rangkaian pekerjaan ketatausahaan ataupun pengelolaan keterangan tertulis lainnya saja, namun administrasi juga berarti luas yaitu yang diartikan sebagai proses segala aktifitas serta kerja sama dalam hal mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian maka dapatlah dipahami juga bahwa administrasi merupakan sesuatu proses dalam hal pelayanan pengaturan.

Administrasi sebagai salah satu bagian dari studi ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia didalamnya organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Siagian (Afiffudin,2010:6) Administrasi adalah rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi.

Menurut Siagian (Afiffudin, 2010:12) administrasi dapat pula dialami dengan melihat dan memahami prosesnya. Berbuat demikian

berarti menganalisis langkah-langkah yang harus diambil. Langkah-langkah yang diambil dalam proses administrasi pada dasarnya terdiri dari:

1. perumusan dan penentuan tujuan akhir,
2. penyusunan,
3. penyusunan dan penetapan rencana sebagai rincian strategi,
4. penyusunan dan penentuan program kerja sebagai penjabaran rencana,
5. pemilihan struktur dan tipe organisasi yang dianggap paling tepat,
6. penggerakan para anggota organisasi,
7. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional,
8. pengawasan,
9. penilaian hasil yang dicapai,
10. penciptaan dan penggunaan system umpan balik yang handal.

Dalam proses-proses yang terjadi dalam organisasi tersebut, dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan dari keseluruhan proses pencapaian tujuan yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi, agar tujuan tersebut benar-benar dapat tercapai. Bentuk pengelolaan dari proses tersebut biasanya disebut dengan manajemen yaitu kegiatan yang terarah melaksanakan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi.

Dengan administrasi yang baik diharapkan proses kegiatan pencapaian tujuan perusahaan berjalan lancar. Administrasi adalah suatu proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (Pasolong, 2008:9) Administrasi Negara adalah: merupakan semua kegiatan dan tindakan

dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Prinsip-prinsip administrasi tersebut seperti yang dikemukakan oleh Hendry Fayol (Sedarmayanti, 2010:16) beliau mengemukakan bahwasanya ada 14 prinsip yang ada dalam administrasi:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- c. Disiplin
- d. Kesatuan pemerintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau pengajian
- g. Pengupahan dan pengajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hirarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa
- n. Solidaritas kelompok kerja

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini

berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan public, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan *good governance*.

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan.

Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano (Keban, 2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Winarno, 2012:4)

2.1.1.1 Teori – Teori Administrasi Publik

Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Penyumbang utama teori administrasi ialah seorang industrial prancis bernama Henry Fayol.

Henry Fayol (Sedarmayanti,2010:20) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu:

1. aktivitas organisasi,
2. fungsi atau tugas pimpinan,
3. prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Karakteristik menurut Nigro (Miftah, 2014:43) yang membedakan administrasi publik dengan administrasi lain, yaitu :

1. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak dari pada diselenggarakan organisasi swasta;
2. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli;
3. Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik);
4. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan public;
5. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar.

2.1.2. Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “*wisdom*” yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statemen of intens*” atau perumusan keinginan menurut Budiarmo (Agustino, 2012:11).

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Nugroho, 2011:30).

Menurut E.S Quade, dalam buku yang berjudul *Public Policy* (Nugroho, 2008:425) mengatakan bahwa :

“analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk dapat memahami secara mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik”.

Menurut Dunn (Agus, 2015:21) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (Erwan Agus, 2015:26), tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun penjelasan tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Di sini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.3. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman. 2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur,1987:40). Jadi pelaksanaan

artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Dari pengertian di atas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- a. Merasa yakin akan mampu mengerjakan,
- b. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya,
- c. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak,
- d. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan
- e. Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Fungsi dari Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak

tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Menurut Faisal Basri (2005:25) ada tiga jenis pelaksanaan untuk tercapainya suatu pengembangan, yaitu:

1. Pelaksanaan secara langsung yaitu pemerintah langsung melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pengembangan.
2. Pelaksanaan secara tidak langsung yaitu berbagai keputusan atau perundang-undangan, dimana pemerintah tidak melaksanakan sendiri pengembangan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan suatu organisasi, sehingga berferak kearah yang sesuai dengan tujuan untu mencapai program yang telah ditentukan.
3. Pelaksanaan campuran yaitu di mana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun orang kemasyarakatan ataupun campur keduanya untuk melaksanakan pengembangan bersama.

2.1.4. Konsep Organisasi

Organisasi secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2010:6) mendefinisikan organisasi sebagai suatu bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat

dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Rosenweg (Sufian, 2013:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo (Syafiie, 2008: 114) *organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system*, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi;
2. Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut;
3. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing;
4. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.

Secara global ada dua jenis organisasi yaitu organisasi publik dan organisasi-organisasi privat/swasta. Organisasi publik ialah organisasi yang bergerak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan tanpa maksud semata-mata memperoleh keuntungan, sedangkan

organisasi privat/swasta ialah organisasi yang bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan maksud memperoleh keuntungan atau dengan kata lain organisasi ini memiliki tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Organisasi publik ialah organisasi formal milik publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam negara administratif pemerintah sebagai organisasi publik menjalankan beberapa fungsinya antara lain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Menurut Siagian (2014:141) dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasanya dikenal sebagai abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Menurut Siagian, (2014:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Sufian (2013:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Organisasi Formal adalah suatu struktur organisasi yang disusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Dalam organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dengan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

2.1.5 Konsep Pemberdayaan dan Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Pemberdayaan

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan.

Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tenang dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “partisipasi (*participatory*), pemberdayaan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*)” (Chambers, dalam Kartasmita, 1996).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logic (Priyono dan Pranarka, 1996:78), sebagai berikut:

- 1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi;
- 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;

- 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan
- 4) pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya.

Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*). Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah empowerment yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar.

Hal itu merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power.

Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996:81), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999:25), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang

saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasmita, 199:32).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

2.1.5.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Berdasarkan pengetahuan tersebut, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Istilah masyarakat berasal dari akar kata Arab "syaraka" yang berarti ikut serta (berpartisipasi). Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan, berikut definisi masyarakat menurut Soeharto, yaitu:

"Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, dan kepentingan-kepentingan yang sama,

perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama".
(Suharto, 2010:47)

Berdasarkan definisi di atas, dengan adanya persamaan yang dimiliki maka akan membentuk suatu kelompok yang memiliki prinsip yang sejalan. Dari persamaan yang ada, maka akan membentuk sebuah kekuatan yang dibangun satu sama lain. Sejalan dengan Selo Sumardjan dalam bukunya yang berjudul *Setangkai Bunga Soisologi*, yaitu:

"masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan".(Sumardjan, 1964:115)

Persamaan yang dimiliki pada setiap individunya dapat menghasilkan sebuah kebudayaan yang menjadi identitas pada suatu sekelompok masyarakat. Kebudayaan mencakup aspek pengetahuan, kesenian, adat istiadat, hukum dan lain-lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat menjabarkan definisi "masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama". (Koentjaraningrat, 1994:329)

Berdasarkan pendapat tersebut, kesamaan identitas tersebut yang kemudian menjadikan sekelompok manusia atau masyarakat menjadi sebuah kekuatan yang diabdikan kepada masyarakat lainnya untuk keperluan bersama. Sistem adat dan istiadat tersebut dilaksanakan secara turun temurun dan dengan keterikatan satu sama lain agar kebudayaan yang telah ada dapat tetap dijaga. Masyarakat menurut

Alimandan dalam buku Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, menjelaskan:

“Pengertian masyarakat dengan istilah *Community*, dimana istilah tersebut menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok itu disebut masyarakat” (Alimandan, 1985:3)

Berdasarkan pendapat di atas, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan mereka. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan:

“Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat merupakan sekelompok orang maupun penduduk yang hidup bersama dalam suatu tempat dan dirasa dapat memenuhi kepentingan hidup bersama serta berkedudukan sebagai pihak yang menerima manfaat pelayanan publik.

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

- a. Beranggotakan minimal dua orang.
- b. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.

- c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
- d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. (Soekanto, 2006:71)

Berdasarkan uraian di atas faktor kesatuan dan persamaan dalam masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan berjalannya sebuah masyarakat yang kemudian menimbulkan suatu kebudayaan yang menjadi identitas kuat di dalamnya. Hubungan dalam waktu yang cukup lama dapat membuat suatu komunikasi yang sejalan karena adanya kebiasaan-kebiasaan sehingga menghasilkan sebuah peraturan-peraturan kesepakatan antar anggota masyarakat untuk menjadi sebuah masyarakat yang baik. Adapun beberapa fungsi masyarakat menurut Suharto (2010:47) adalah:

1. Penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa;
2. Lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan;
3. Keamanan publik;
4. Sosialisai;
5. Wadah dukungan bersama atau gotong royong;
6. Kontrol sosial;
7. Organisasi dan partisipasi politik.

Definisi mengenai fungsi masyarakat ini merupakan hasil dari adanya persamaan yang ada sehingga membuat suatu fungsi bagaimana masyarakat itu berguna bagi satu sama lain. Masyarakat berfungsi sebagai wadah dukungan bersama untuk mencapai tujuan yang akan

dicapai bersama. Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Namun demikian, untuk memberdayakan, masyarakat memerlukan rangkaian proses panjang, agar mereka menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan uraian pengertian mengenai pemberdayaan dan masyarakat, maka menurut Sunyoto Usman (2008:30). mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian”.

Berdasarkan uraian tersebut dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut. Serta diperlihatkan strategi pemanfaatan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Pada proses tersebut, masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil yang optimal.

Sedangkan mengenai unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, menurut Suhendra (2006: 87) unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Kemauan politik yang mendukung;
2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh;
3. Motivasi;
4. Potensi masyarakat;
5. Peluang yang tersedia;
6. Kerelaan mengalihkan wewenang;
7. Perlindungan;
8. Awareness (kesadaran)

Hal diatas menunjukkan bahwa unsur pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan yang realistis. Yang ditunjukkan dengan adanya sasaran, kebijaksanaan maupun prosedur pelaksanaan yang jelas. Berdasarkan pada unsur pemberdayaan masyarakat yang baik tersebut, maka hendaknya dalam perumusan program pemberdayaan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Supaya program pemberdayaan yang dilakukan bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian diatas menyebutkan bahwa masyarakat memiliki wewenang yang lebih besar. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan menarik manfaat dari hasil pembangunan. Di samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut, masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya.

2.1.6 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan menurut Sulistyani (2004:18) berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Rappaport (1984:26) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Definisi yang senada juga menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Anwar, 2013:21) Bila melihat dari adanya beberapa pengertian di atas, bisa terlihat bahwa terdapat perbedaan konsep pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh Ambar Teguh mencakup tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Berbeda dengan yang dimiliki Djohani dan Rappaport yang lebih menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, pemberian wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungan sesuai dengan, potensi, kemampuan, dan keinginan yang dimiliki.

Proses pemberdayaan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat akan segera terwujud, dimana masyarakat berperan sebagai subjek dari pembangunan dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator saja. Terwujudnya masyarakat yang mandiri sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat tidak serta merta berhenti sampai di sini saja. Seperti yang sudah dikemukakan pada awal paragraf, pemberdayaan merupakan membangun sumber daya manusia untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan juga budaya secara bertahap dan terjaga. Terjaga di sini berarti bahwa masyarakat yang sudah mandiri tetap memerlukan perlindungan dan pengawasan agar tidak mengalami kemunduran, sehingga terbentuklah kedewasaan sikap masyarakat.

Mardikanto (2013:161) menjelaskan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.

2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan terbaik atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya.

Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Kartasmita dalam Mardikanto, 2013:163), Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

- 1) Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung pada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya.

- 2) Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.
- 3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendirisendiri masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan secara dinamis mengembangkan diri mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat mengandung arti adanya upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan haruslah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Pemberdayaan masyarakat menurut Aziz, dkk (2005:136) merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus

terusmeneru, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Sedangkan menurut Usman (2003 :40) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar.

2.1.6.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Menurut sulistiyani (2004:79), kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Ketiga kondisi

tersebut hendaklah diarahkan untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
2. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan.
3. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.
4. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan/keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Kondisi diatas diperlukan sinergi dan pengembangan melalui intervensi dari suatu program pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk membangun kompetensi masyarakat agar dapat berkembang dan keluar dari jaringng kemiskinan. Untuk melengkapi komunitas yang baik tersebut, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan, sebagaimana dijelaskan oleh Sulityani (2004:80), yaitu :

- 1) Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
- 2) Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.

- 3) Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.
- 4) Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Tujuan pemberdayaan sebagaimana dijelaskan diatas mengutamakan pada kemandirian masyarakat. Kemandirian ini dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya dengan adanya intervensi dari pihak luar, menjangring kemitraan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang kedepannya diasumsikan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat.

2.1.6.2 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bukan hanya sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan terhadap pihak yang lemah saja, akan tetapi terdapat sebuah proses untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga dapat berdaya dan memiliki daya untuk hidup secara mandiri.

Menurut Ife (1995:112), pemberdayaan adalah lebih kepada menyiapkan masyarakat akan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Bila melihat dari apa yang telah dipaparkan baik oleh Sulistyani ataupun Ife, terdapat sebuah persamaan, dimana keduanya ada sebuah proses untuk menghasilkan atau mengarah kepada sesuatu yang berkaitan dengan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap untuk

mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah baik *knowledge*, *attitude*, maupun praktik menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik.

Menurut Sulistyani (2004:69) terdapat pemberdayaan masyarakat berjalan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan-pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.1.6.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat

dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik. Adapun prinsip pemberdayaan masyarakat, Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri,

karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukandalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Beberapa prinsip mengenai pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Suharto (2005:68) dalam Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, sebagai berikut:

a. Membangun relasi pertolongan yang:

- 1) merefleksikan respon empati
- 2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*);
- 3) menghargai perbedaan dan keunikan individu;
- 4) menekankan kerjasama klien (*client partnership*).

b. Membangun komunikasi yang:

- 1) menghormati martabat dan harga diri klien;
- 2) mempertimbangkan keragaman individu;
- 3) berfokus pada klien;
- 4) menjaga kerahasiaan klien.

c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang:

- 1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah;
- 2) menghargai hak-hak klien;
- 3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar;
- 4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui:

- 1) ketaatan terhadap kode etik profesi;
- 2) keterlibatan dalam pengembangan professional; riset dan perumusan kebijakan;
- 3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik;
- 4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat menempatkan dirinya sebagai actor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang ada disekitarnya. Tingkat kepekaan terhadap satu sama lain dalam menghadapi sebuah masalah sangat dibutuhkan dalam sebuah aktivitas pemeberdayaan masyarakat.

2.1.7. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB–RW) Kota Pekanbaru

2.1.7.1 Pengertian Program

Menurut Sujianto (2008:32) program adalah suatu kompleks dari tujuan, kebijakan, prosedur, peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Menurut Charles O. Jones dalam Amalia (2009:295) pengertian program adalah cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani yang dimulai dari tingkat RT dan RW.

Program PMB RW ini memiliki payung hukum yang jelas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang PMB RW Kota Pekanbaru. Bahkan belum segenap setahun berjalan, program Walikota Pekanbaru ini meraih penghargaan dari Menteri Sosial RI pada Desember 2014 lalu untuk kategori Walikota yang memiliki program inovatif yang berkaitan dengan Kemiskinan.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini wilayah Kecamatan Tampan sebagai pelaksana dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) pada prinsipnya merupakan upaya pemerintah untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya masyarakat akan timbul peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru.

Kegiatan PMB-RW pada prinsipnya merupakan kegiatan pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang dianggarkan melalui SKPD terkait dan pendanaannya berasal dari berbagai sumber, yaitu digunakan untuk :

1. Pemberdayaan Sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat;
2. Pemberdayaan Ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera;
3. Pemberdayaan Lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Dana kegiatan PMB-RW bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau, APBN, swadaya maupun pihak lainnya yang tidak mengikat serta dapat dipergunakan untuk tiga komponen yaitu penguatan kapasitas, kegiatan-kegiatan dan insentif pelaksana kegiatan PMB-RW.

2.1.7.2 Strategi Pelaksanaan PMB RW

Strategi Pelaksanaan PMB-RW dibagi kedalam 3 fase pemberdayaan yaitu :

1. Fase Inisiasi, yaitu fase semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, dan masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah.

2. Fase Partisipatoris, yaitu fase pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
3. Fase Emansipatoris, yaitu fase pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatori ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri (fase mandiri).

Lokasi Kegiatan Program PMB – RW.

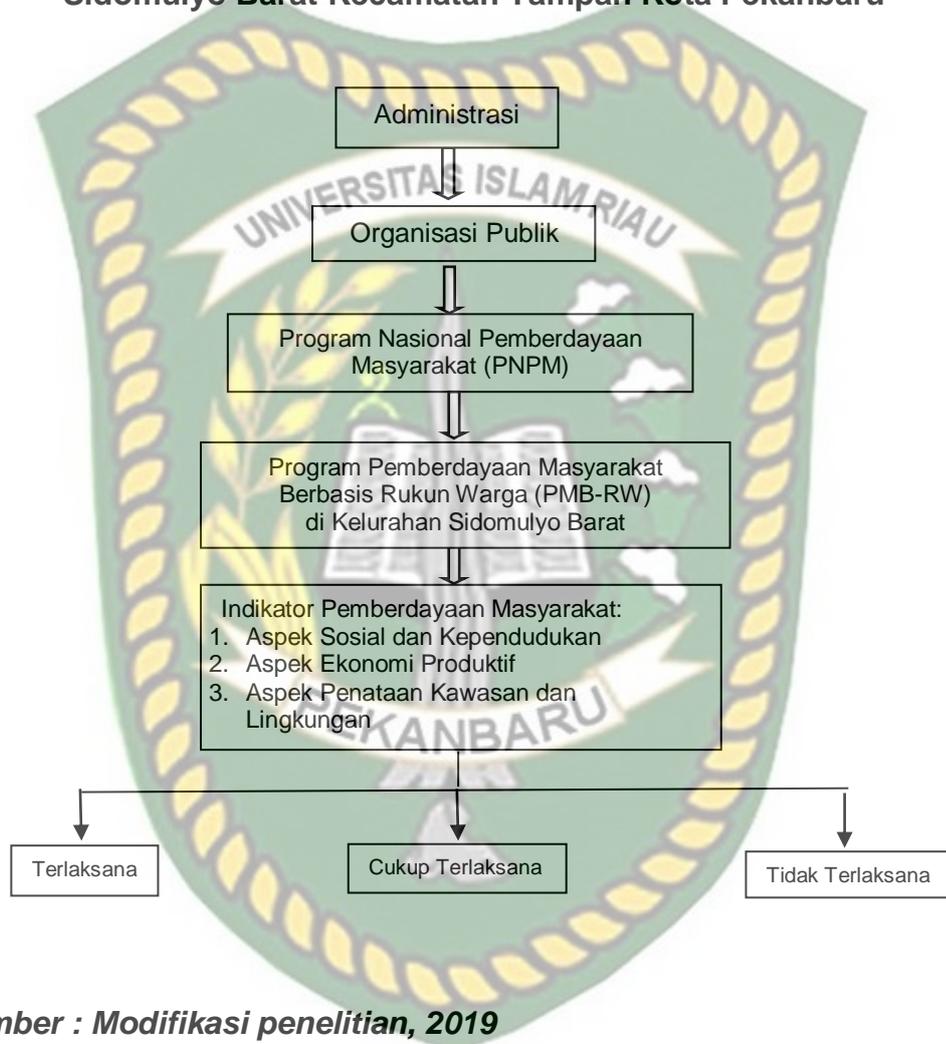
1. Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru;
2. Rukun Warga yang melaksanakan proses Siklus PMB–RW dengan benar;
3. Rukun Warga yang RKP-RW.
4. Rukun Warga yang memiliki Kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM–RW) sebagai pelaksana Program PMB-RW disahkan melalui Surat Keputusan Lurah setempat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Program PMB – RW) melalui:

1. Pelatihan dan penguatan
2. Sosialisasi dan Lokakarya
3. Diskusi Tematik tentang Program PMB – RW, melalui Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru.

2.2 Kerangka Pikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pikiran Tentang Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi penelitian, 2019

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

| Nama/ Judul Penelitian | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|--|
| <p>Pujiyati, 2017</p> <p><i>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir</i></p> <p>(Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau)</p> | <p>Hasil penelitian menyatakan Bahwa Ada 3 pola masalah yang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial, masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah di dapatkan dalam Program PMB-RW. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat untuk ide kegiatan sudah berjalan melalui musyawarah jaringan kerja berupa informasi, koordinasi, dan komunikasi.</p> | <p>Pada penelitian Pujiyati ini Pelaksanaan program ini memulainya dengan memberikan skill melalui pelatihan kepadawarga yang menjadi sasaran program PMB-RW, dengan persamaan hasil pencapaian yaitu: menggunakan konsep pemberdayaan oleh Sujianto yaitu: Kemandirian, Partisipatif, Jaringankerja, Keadilan, Keberlanjutan</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian Pujiyati membahas <i>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)</i> sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang pelaksanaan dari program PMB RW tersebut mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai ke evaluasi pelaksanaan program.</p> |
| <p>Talgia, 2017</p> <p><i>Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Di Kota Pekanbaru</i></p> <p>(Jurnal Renaissance Volume 2 No. 02 Agustus 2017)</p> | <p>Dari hasil penelitian tentang Proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat yang akan penting mengembangkan potensipotensi yang telah dimiliki peserta dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kecamatan Bukit Raya.</p> | <p>Pada penelitian menurut Talgia menggambarkan tentang Proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW), pada penelitian selanjutnya akan dibahas pelaksanaan dari PMB RW tersebut, persamaannya adalah teori evaluasi kebijakan pada program PMB RW</p> | <p>Perbedaan penelitian yang diteliti sekarang dengan penelitian Talgia, bahwa pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang Proses dari PMB RW sedangkan pada penelitian yang akan dibahas pelaksanaan dari program PMB RW tersebut mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai ke evaluasi pelaksanaan program.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| <p>Dadang Mashur, 2016</p> <p><i>Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) Di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis</i></p> <p>(Perpustakaan Universitas Riau)</p> | <p>Hasil Penelitian menjelaskan Bahwa keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kegiatan UED-SP yaitu dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka yang sangat dominannya adalah keberhasilannya dari faktor disposisi dan struktur birokrasinya efektif, sementara dari faktor komunikasi dan sumber daya kurang efektif, tetapi kedua faktor tersebut sudah mendekati keberhasilan dan sedikit perlu di benah lagi. pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) di bidang ekonomi melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) dalam kegiatan UED-SP yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengembangan perekonomian masyarakat dengan usaha ekonomi masyarakat di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.</p> | <p>Pada penelitian menurut Dadang menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Persamaan dalam penelitian yang akan diteleti ini, tentang teori kebijakan program peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan.</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian ini yang membahas keseluruhan dari Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan pada penelitian selanjutnya dengan yang akan diteliti mengenai pelaksanaan dari program PMB RW di Kecamatan.</p> |
| <p>Sri Wahyuni, 2018</p> <p>Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kota Pekanbaru</p> <p>(JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018)</p> | <p>Dari hasil penelitian penulis pada Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui Pemberdayaan yaitu Kepelatihan. Adanya Pelaksanaan PMBRW tersebut untuk mendasari bahwasanya Rukun Warga merupakan suatu pembagian wilayah Indonesia dibawah kelurahan, Rukun Warga adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut untuk mencakup atau mengetahui warganya yang membutuhkan ataupun dengan Pelaksanaan PMB-RW bisa meningkatkan taraf kehidupan</p> | <p>Pada penelitian menurut Sri wahyuni menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis rukun Warga (PMB-RW) hanya di satu kelurahan, Persamaan dalam penelitian yang akan diteleti ini, tentang teori kebijakan program peningkatan pemberdayaan Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian ini pada lokasi penelitian yang membahas Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pada satu kelurahan di Kecamatan Tampan, sedangkan pada penelitian selanjutnya dengan yang akan diteliti mengenai pelaksanaan dari program PMB RW semua kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.</p> |

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---|---|
| <p>Erniyati, 2012</p> <p><i>Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat</i></p> <p><i>(Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta)</i></p> | <p>Hasil Penelitian menjelaskan Bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PPMK adalah strategi yang berbasis aras mezzo. Staretgi aras mezzo adalah salah satu strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh sekelompok klien. Strategi tersebut dilakukan melalui pelatihan komputer dan dana begulir. Untuk pelatihan komputer, teknik pengajaran yang diberikan berupa bimbingan yaitu teori dan praktek. Teorinya adalah memberikan pengetahuan tentang teknik dan tata cara komputer. Praktek diberikan secara langsung melalui pelatihan di ruang komputer dan para peserta diuji satu persatu dengan baik.</p> | <p>Pada penelitian menurut erniyati menjelaskan tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berbasis aras mezzo, Persamaan dalam penelitian yang akan diteliti ini, tentang bentuk pelatihan yang diberikan pada strategi PMBRW di penelitian selanjutnya.</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian ini yang membahas strategi pemberdayaan yang dimulai dari pembinaan individu meliputi bina fisik, bina sosial, dan bina ekonomi, sedangkan pada penelitian selanjutnya dengan yang akan diteliti mengenai bentuk dari pelaksanaan dari program PMB RW di Kecamatan.</p> |
| <p>Leviana, 2014</p> <p>Pemberdayaan masyarakat berbasis pada komunitas RW: studi tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) di Kelurahan Bintaro - Jakarta Selatan</p> <p><i>(Universitas Indonesia Library)</i></p> | <p>Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas.</p> | <p>Pada penelitian menurut Leviana menjelaskan tentang proses dari program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK), Persamaan dalam penelitian yang akan diteliti ini, tentang elemen-elemen pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari institusi tingkat RT/RW sampai ke pengawas.</p> | <p>Perbedaan dalam penelitian ini pada pada proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan, sedangkan pada penelitian selanjutnya yang dibahas dari indicator kemandirian, partisipasi, Jaringan Kerja dan Keberlanjutan.</p> |

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama.

Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
2. **Kebijakan Publik (*Public Policy*)** adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
3. **Evaluasi Kebijakan** merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan.
4. **Organisasi** adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.
5. **Program** adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus

dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

6. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.
7. **Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)** adalah salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang dimiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dari pola pikir mereka dengan adanya program tersebut. Indikator pemberdayaan masyarakat:
 - a. **Pemberdayaan Sosial dan Kependudukan** meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat.
 - b. **Pemberdayaan Ekonomi Produktif** meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja, bantuan dana dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera;
 - c. **Pemberdayaan Penataan Kawasan dan Lingkungan** meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.
8. **Pelaksanaan** adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

9. **Masyarakat** adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional yang merupakan penduduk Kota Pekanbaru.
10. **Daerah** adalah Kota Pekanbaru.
11. **Wilayah** adalah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
12. **Kecamatan** atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat yang berada di Kota Pekanbaru.
13. **Kelurahan** adalah bagian wilayah dari Kecamatan Tampan sebagai perangkat Kecamatan yaitu Kelurahan Sidomulyo Barat.
14. **Rukun warga** adalah Rukun Warga yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru disingkat RW.
15. **Rukun warga** adalah Rukun Tetangga yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru disingkat RT.
16. **Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga** adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah yang dipercaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui program PMB-RW.
17. **Tenaga Pendamping** adalah pendamping Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga yang diseleksi, dipilih oleh panitia seleksi dan ditetapkan oleh Walikota Kota Pekanbaru yang bertugas memfasilitasi proses pemberdayaan program PMB RW

2.5. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan menggunakan Indikator Berdasarkan Teori Sujianto (2008:76) sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan keberhasilan pelaksanaan program PMB RW sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>Program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) adalah salah satu bentuk wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah sehingga pola pikir masyarakat bisa berubah. (Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2019)</p> | <p>Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru</p> | <p>Aspek Sosial dan Kependudukan</p> <p>Aspek Ekonomi Produktif</p> <p>Aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan</p> | <p>a. Membangun sarana Kesehatan b. Membangun sarana keamanan Intelektual.</p> <p>a. Melakukan Sosialisasi dan pelaksanaan untuk membentuk usaha Kelas Menengah b. Membangun koperasi untuk melakukan Simpan Pinjam Dana</p> <p>a. Pembangunan jalan berupa semenisasi b. Melakukan pengelolaan sampah dalam lingkungan RW</p> |

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan. Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Singarimbun (2011:8)

Penelitian bersifat kualitatif, sebab penilaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan penelitian yang terkait antara antara berhasil tidaknya program tersebut, kesesuaian dengan tujuan dan rencana kerja Kota Pekanbaru. Untuk itu peneliti berasumsi bahwa jenis penelitian yang cocok dengan permasalahan ini adalah kualitatif dengan menggunakan prosedur-prosedur analisis menurut waktu setelah tindakan.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena-fenomena dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2009:11). Metode

kualitatif ini akan menghasilkan penemuan berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian selayaknya adalah tempat dimana peneliti melakukan dan mendapatkan sumber-sumber dan data penelitian yang utama Lokasi. Penelitian dilaksanakan pada kantor Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Jl. Purwodadi-HR. Soebrantas dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga oleh Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang

berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.
2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berupa dokumen, Struktur Organisasi, Tupoksi, Petunjuk Teknis Kegiatan PMB-RW dan hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti (Bungin, 2010:76).

Informasi Penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang di teliti (Moleong 2012:132). Fakta yang di butuhkan meliputi kata- kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi

tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat dari key informan melalui proses wawancara dan pengamatan. Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian, yaitu Pejabat Struktural Bappeda Kota Pekanbaru, Camat Tampan dan Lurah Sidomulyo Barat dan Kasi.
2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, yaitu RW, Pendamping PMB-RW Kelurahan serta Masyarakat/peserta di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 15 (Lima belas) orang sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

| No | Informan | Jabatan | Jumlah |
|----|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Informan Kunci | 1. Kabid Perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Kota Pekanbaru 2. Kasubbid Perekonomian dan Investasi 3. Camat Tampan 4. Lurah Sidomulyo Barat 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat | 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|
| 2. | Informan Utama | 1. RW di lingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat 2. Pendamping PMB-RW di Kelurahan 3. Peserta PMB RW di lingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat | 3 orang 2 orang 5 orang |
| Total Informan Penelitian | | | 15 Orang |

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data (Silalahi, 2009:280). Berdasarkan sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan ditinjau dari dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Adapun pertanyaan yang diberikan pada wawancara ini adalah mengenai keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

2. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan akan objek yang akan diteliti. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data- data yang valid diantaranya ke tempat yang melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan tempat lainnya yang menjadi objek tempat yang ingin diteliti.
3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan informan peneliti.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. (Moleong, 2010:147).

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009:339). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Teknik triangulasi ini dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan dan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan pegawai pemerintahan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Kaitannya dengan penelitian ini, adanya keabsahan data dari pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara dan isi suatu dokumennya yang berkaitan sehingga dengan langkah tersebut penyusunan data yang dilakukan dapat diupayakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Sejarah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. daerah ini semula sebagai ladang masyarakat, lambat laun menjadi perkampungan. kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru disebut "Dusun Payung Sekaki" terletak ditepi muara sungai Siak.

Namun kemajuan dan keindahan Payung Sekaki tidak begitu terkenal pada masanya melainkan lebih dikenal adalah Senapelan, perkembangan perkampungan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura. semenjak dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana sebagai pusat pemerintahan berada di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan, diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang, usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda MuhammadAli di tempat yang baru disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "PekanBaharu" mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut "Pekanbaru". Kemudian tanggal 23 Juni 1784 M dikuatkan dengan Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2005.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan.

Perkembangan pemerintahan Kota Pekanbaru senantiasa mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.
11. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kelurahan baru dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Nomor 55 tahun 1999 tanggal 21 Oktober menjadi 50 Kelurahan.
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
13. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Jumlah Kecamatan dimekarkan dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan.
14. Peraturan Daerah No.4 tahun 2003 tentang pembentukan Kelurahan, dimekarkan dari 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan.
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2005 Tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2005.
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan tanggal 22 Agustus 2006.
18. Perkembangan Jumlah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, Penduduk dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2012,

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya peran serta masyarakat menjadi hal yang penting dan utama dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan harapan semua

pihak, tanpa dukungan masyarakat tentunya pembangunan di segala bidang yang direncanakan tidak akan terwujud sesuai dengan apa yang telah digariskan.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

a. Visi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah:

"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

1. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.
2. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

3. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.
4. Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan, dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.
5. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

b. Misi Kota Pekanbaru

Misi Kota Pekanbaru merupakan gambaran dan cerminan kondisi masa depan, dan dengan adanya Visi antara Walikota Pekanbaru yakni Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani, maka Misi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi tinggi, serta

menguasai teknologi yang tinggi, mandiri dan tangguh serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan internasional yaitu masyarakat yang pintar (*smart people*).

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani
3. Menyediakan infrastruktur dasar JALITA yang memadai yaitu meliputi: Jalan, Air Bersih dan Sanitasi, Listrik dan Telekomunikasi.
4. Mewujudkan penataan ruang lahan yang efisien, efektif dan pemerataan pembangunan dalam semua wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki, serta pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*Green City*)
5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat serta membuka lapangan kerja melalui peningkatan sektor unggulan yaitu sektor Jasa, Perdagangan dan industri. Mewujudkan Proses Pendidikan Berbasis Relegius.

4.1.3. Geografis dan Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut sekaligus merupakan kedudukan dari ibu kota Provinsi Riau sendiri. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 adalah wilayah Pekanbaru seluas 632,27 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 769.497 jiwa. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 12 daerah kecamatan dan 83 daerah kelurahan. Kota Pekanbaru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Pekanbaru saat ini memiliki 83 Kelurahan pada 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, berikut adalah jumlah Kecamatan dan kelurahan pada Tahun 2016 sebelum pemekaran sebagai berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, Penduduk dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2016– 2017

| No Urut | Kecamatan | Kelurahan | Jml RW | | RT | Jumlah Penduduk | Luas (Km2) | Jumlah KK |
|---------|----------------|--------------------|--------|------|-----|-----------------|------------|-----------|
| | | | 2016 | 2017 | | | | |
| 1 | Tampan | Simpang Baru | 16 | 34 | 78 | 43.808 | 23,59 | 11.323 |
| | | Sidomulyo Barat | 19 | 30 | 108 | 43.363 | 13,69 | 10.372 |
| | | Tuah Karya | 13 | 40 | 88 | 55.543 | 12,09 | 13.711 |
| | | Delima | 13 | 15 | 77 | 32.920 | 10,44 | 7.402 |
| | | Sub Total | 4 | 65 | 119 | 381 | 188.806 | 59,81 |
| 2 | Payung sekaki | Labuhbaru timur | 12 | 12 | 57 | 24.926 | 3,62 | 4.985 |
| | | Tampan | 9 | 9 | 38 | 20.071 | 9,37 | 4.014 |
| | | Air hitam | 3 | 3 | 15 | 7.175 | 5,46 | 1.435 |
| | | Labuhbaru barat | 14 | 15 | 54 | 22.981 | 24,43 | 4.596 |
| | | Sub Total | 4 | 38 | 39 | 182 | 93.479 | 43 |
| 3 | Bukit Raya | Simpang Tiga | 17 | 17 | 82 | 39.705 | 13,65 | 10.310 |
| | | Tangkerang Selatan | 12 | 12 | 43 | 16.791 | 3,09 | 3.907 |
| | | Tangkerang Utara | 15 | 16 | 58 | 21.590 | 2,64 | 4.600 |
| | | Tangkerang Labuai | 12 | 12 | 47 | 15.782 | 2,67 | 3.287 |
| | | Sub Total | 4 | 56 | 57 | 230 | 101.548 | 22,05 |
| 4 | Marpoyan Damai | Tangkerang Tengah | 20 | 20 | 88 | 34.438 | 4,65 | 8.607 |
| | | Tangkerang barat | 12 | 12 | 53 | 17.916 | 5,35 | 4.479 |
| | | Maharatu | 19 | 20 | 74 | 31.749 | 11,26 | 7.937 |
| | | Sidomulyo timur | 12 | 12 | 56 | 26.126 | 7,19 | 6.532 |
| | | Wonorejo | 7 | 7 | 29 | 20.369 | 1,34 | 5.092 |
| | | Sub Total | 5 | 70 | 71 | 300 | 130.349 | 29,79 |
| 5 | Tenayan Raya | Kulim | 19 | 23 | 68 | 21.067 | 51,5 | 5.110 |
| | | Tangkerang Timur | 18 | 21 | 81 | 27.361 | 9,92 | 6.785 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|----|----|-----|--------|---------|--------|--------|
| | | Rejosari | 24 | 24 | 101 | 30.978 | 11,11 | 7.306s | |
| | | Sail | 30 | 30 | 116 | 32.623 | 98,74 | 8.019 | |
| | | Sub Total | 4 | 96 | 98 | 377 | 136.716 | 171,27 | 31.771 |
| 6 | Lima Puluh | Rintis | 8 | 8 | 29 | 6.585 | 0,68 | 1.646 | |
| | | Sekip | 7 | 7 | 25 | 8.382 | 0,82 | 2.096 | |
| | | Tanjung Rhu | 7 | 7 | 42 | 16.158 | 1,68 | 4.040 | |
| | | Pesisir | 8 | 8 | 27 | 10.498 | 0,86 | 2.625 | |
| | | Sub Total | 4 | 30 | 30 | 122 | 41.994 | 4,04 | 9.763 |
| 7 | Sail | Cinta Raja | 5 | 5 | 22 | 6.624 | 0,87 | 1.711 | |
| | | Suka Maju | 5 | 5 | 20 | 7.290 | 1,21 | 1.538 | |
| | | Suka Mulya | 8 | 8 | 33 | 8.879 | 1,18 | 2.615 | |
| | | Sub Total | 3 | 18 | 18 | 75 | 21.809 | 3,26 | 5.559 |
| 8 | Pekanbaru kota | Simpang empat | 5 | 5 | 14 | 1.871 | 0,66 | 507 | |
| | | Sumahilang | 9 | 9 | 25 | 5.897 | 0,51 | 1.297 | |
| | | Tanah datar | 7 | 7 | 26 | 6.569 | 0,29 | 1.375 | |
| | | Kota Baru | 6 | 6 | 21 | 5.219 | 0,24 | 877 | |
| | | Sukaramai | 7 | 7 | 22 | 5.386 | 0,25 | 1.064 | |
| | | Kota tinggi | 6 | 6 | 17 | 3.948 | 0,31 | 716 | |
| | | Sub Total | 6 | 40 | 40 | 125 | 25.784 | 2 | 5.873 |
| 9 | Sukajadi | Jadirejo | 4 | 4 | 18 | 5.379 | 0,66 | 1.793 | |
| | | Kampung Tengah | 7 | 9 | 27 | 8.831 | 0,55 | 2.960 | |
| | | Kampung Melayu | 9 | 9 | 34 | 8.351 | 0,93 | 2.784 | |
| | | Kedung Sari | 4 | 4 | 15 | 6.924 | 0,41 | 2.308 | |
| | | Harjo Sari | 6 | 6 | 18 | 5.902 | 0,39 | 1.967 | |
| | | Sukajadi | 3 | 5 | 23 | 8.076 | 0,44 | 2.692 | |
| | | Pulau Karam | 3 | 3 | 13 | 4.021 | 0,44 | 1.340 | |
| | | Sub Total | 7 | 36 | 40 | 148 | 47.814 | 4 | 11.745 |
| 10 | Senapelan | Padang Bulan | 10 | 10 | 39 | 9.822 | 1,59 | 2.456 | |
| | | Padang Terubuk | 6 | 6 | 27 | 7.870 | 1,54 | 1.968 | |
| | | Sago | 5 | 5 | 18 | 2.038 | 0,68 | 510 | |
| | | Kampung Dalam | 5 | 5 | 18 | 2.873 | 0,68 | 575 | |
| | | Kampung Bandar | 8 | 8 | 30 | 4.198 | 1,19 | 840 | |
| | | Kampung Baru | 8 | 8 | 22 | 9.313 | 0,97 | 1.863 | |
| | | Sub Total | 6 | 42 | 42 | 148 | 37.024 | 7 | 8.295 |
| 11 | Rumbai | Umban sari | 10 | 10 | 41 | 15.971 | 8,68 | 4.013 | |
| | | Muara fajar | 10 | 11 | 38 | 11.333 | 48,92 | 2.624 | |
| | | Rumbai bukit | 8 | 10 | 27 | 8.097 | 28,97 | 1.891 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| | | Palas | 5 | 6 | 19 | 9.837 | 34,32 | 2.188 | |
| | | Sri meranti | 17 | 17 | 75 | 21.708 | 8,59 | 4.886 | |
| | | Sub Total | 5 | 50 | 54 | 201 | 70.219 | 129 | 16.320 |
| 12 | Rumbai pesisir | Meranti pandak | 13 | 13 | 53 | 11.708 | 3,88 | 2.562 | |
| | | Limbangan | 10 | 11 | 44 | 11.537 | 2,48 | 2.603 | |
| | | Lembah sari | 12 | 14 | 48 | 11.340 | 9,77 | 2.620 | |
| | | Lembah damai | 10 | 10 | 34 | 7.357 | 4,32 | 1.712 | |
| | | Limbangan baru | 13 | 16 | 74 | 19.921 | 2,09 | 4.701 | |
| | | Tebing tinggi okura | 8 | 11 | 28 | 5.116 | 140 | 1.298 | |
| | | Sub Total | 6 | 68 | 75 | 285 | 69.016 | 163 | 16.314 |

Sumber : Laporan BPS dan SKPD Kecamatan Tahun 2017.

Kota Pekanbaru berada pada posisi koordinat 0.4815278°LU 101.468675°BT. Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah satu bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II untuk jalur udara, Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.

Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak mengalir Pekanbaru dari arah barat ke timur dan berada

pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 °C sampai 35.6 °C, serta suhu minimum yakni antara 20.2 °C sampai 23.0 °C.

Pekanbaru menjadi kota tempat pusat pemerintahan Provinsi Riau sehingga dibangun gedung-gedung Pemerintahan Provinsi Riau seperti Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai dinas pemerintah lainnya. Pekanbaru juga memiliki berbagai tempat wisata kota diantaranya adalah, Perpustakaan Soeman HS, Masjid Agung Annur, Museum Daerah Sang Nila Utama, Taman Wisata Alam Mayang, Danau Buatan, Pasar Bawah Senapelan dan sebagainya.

4.2 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

4.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah \pm 199.792 KM². Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9 Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 9 Kelurahan Yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Buah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
5. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
6. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
7. Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
8. Kelurahan Buah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel. Buah Karya)
9. Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Buah Karya)

Berikut data Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri atas 9 kelurahan, 135 RW dan 605 RT, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Kecamatan Tampan

| NO | KELURAHAN | LUAS WILAYAH (KM ²) | JUMLAH KK | PENDUDUK | | | JUMLAH RT | JUMLAH RW |
|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DELIMA | | 3377 | 9030 | 9642 | 18672 | 48 | 8 |
| 2 | TOBEK ODANG | | 6170 | 16646 | 15531 | 32177 | 73 | 15 |
| 3 | SIMPANG BARU | | 2439 | 6779 | 6722 | 13501 | 35 | 10 |
| 4 | BINAWIDYA | | 2507 | 6942 | 6777 | 13719 | 30 | 9 |
| 5 | AIRPUTIH | | 4671 | 11488 | 10893 | 32381 | 62 | 10 |
| 6 | TUAHMADANI | | 2670 | 7614 | 7494 | 15108 | 31 | 8 |
| 7 | TUAH KARYA | | 7738 | 18122 | 17997 | 36119 | 85 | 19 |
| 8 | SIALANGMUNGGU | | 10720 | 21878 | 21600 | 45478 | 127 | 31 |
| 9 | SIDOMULYO BARAT | | 9054 | 17822 | 17603 | 35425 | 115 | 26 |
| TOTAL | | 59,81 | 49.346 | 116.321 | 114.259 | 230.580 | 605 | 135 |

Sumber : Kantor Camat Tampan, 2019.

4.2.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

a. Visi

Visi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Terdepan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Terbaik Pemberian Pelayanan Publik Se Kecamatan Kota Pekanbaru”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan misi yang jelas dan merupakan pernyataan tentang tujuan pembangunan jangka menengah secara terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur.

Adapun **MISI** Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya menunjang keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, bertanggung jawab serta berjiwa profesionalisme
3. melaksanakan koordinasi disetiap line terkait dengan penciptaan komunikasi yang efektif diantara aparatur kecamatan
4. meningkatkan kerjasama, loyalitas dan integritas di dalam jiwa setiap aparatur kecamatan.

Moto Pelayanan pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu:

SENYUM – SAPA – LAYANI, kami hadir dengan pelayanan yang

MANTAP :

M = Mudah

A = Aman

N = Nyaman

T = Tepat

A = Adil

P = Profesional

4.2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Walikota Pekanbaru telah menyerahkan sebagian kewenangan tersebut kepada Camat untuk menjalankan fungsi pelayanan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang meliputi:

1. Surat Keputusan Walikota Nomor: 112 Tahun 2002 Tanggal 1 Juli 2002 Tentang Pelimpahan kewenangan kepada Camat.
2. Surat Walikota No: 065/377-ORG/2003 Tanggal 17 April 2003 Tentang Pelayanan Terpadu.

3. Keputusan Walikota No: 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebersihan. Kemudian kewenangan yang diterima camat tersebut sebagian telah di serahkan pula kepada Lurah berdasarkan Surat Keputusan Camat Tampan Nomor 292 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat Kepada Lurah.

Tugas pokok **Camat** mempunyai rincian tugas:

1. Menangani sebagian otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Fungsi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas adalah:

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Sebagai penyelenggara atau pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Tugas pokok **Sekretaris Camat** mempunyai rincian tugas:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif;
2. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif guna untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
3. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan;
4. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan;
5. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan;
6. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan;
7. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

8. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada camat secara lisan maupun tertulis;

Fungsi Sekretaris Camat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksudkan pada tugas pokok di atas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan teknis administratif
- b) Perencanaan program kerja kecamatan
- c) Koordinasi tugas administrasi
- d) Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
- e) Pengevaluasian tugas pemerintahan kecamatan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

4.2.4. Sumber Daya Manusia Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari jabatan Kepegawaian, jumlah Pegawai yang ada saat ini sebanyak 61 orang pegawai yang terdiri dari tabel dibawah ini:

Table 4.3.
Jumlah Pegawai pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Tahun 2019

| INSTANSI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kantor Camat Tampan | 16 | 10 | 26 |
| Kantor Lurah Delima | 3 | 3 | 6 |
| Kantor Lurah Simpang Baru | 2 | 7 | 9 |
| Kantor Lurah Sidomulyo Barat | 3 | 5 | 8 |
| Kantor Lurah Tuah Karya | 5 | 5 | 10 |
| Kantor Lurah Tobekgodang | 2 | 4 | 6 |
| Kantor Lurah Airputih | 5 | 2 | 7 |
| Kantor Lurah Binawidya | 3 | 4 | 7 |
| Kantor Lurah Tuahmadani | 4 | 2 | 6 |
| Kantor Lurah Sialangmunggu | 3 | 4 | 7 |
| TOTAL | 46 | 46 | 92 |

Sumber : Kecamatan Tampan, 2019.

4.3 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

4.3.1 Gambaran Umum

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru sesuai Peraturan Daerah Kelurahan Sidomulyo Barat ini dimekarkan menjadi Kelurahan Sialang Munggu.

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 26 Rukun Warga (RW) dan 115 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 41.033 dan tahun 2017 penduduk kelurahan Sidomulyo Barat mengalami penurunan hampir setengah dari tahun 2016 yaitu sebanyak 29.448 jiwa.

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari beberapa RT dan RW, dan setiap bulannya masing-masing RT dan RW wajib melaporkan mengenai data-data kependudukannya kepada kecamatan.

Pengolahan data kependudukan yang dilakukan oleh RT dan RW saat ini masih berjalan dengan manual dimana buku catatan serbaguna merupakan alat utama dalam melakukan proses pengolahan data penduduk. Selain itu, sistem pendistribusian laporan data kependudukan yang dilakukan oleh RT dan RW sekarang ini, dimana setiap RT dan RW mengantarkan laporan tersebut dalam bentuk hardcopy. Kemudian data dari masing-masing RT dan RW akan disimpan dalam database

kelurahan. Proses pendistribusian data yang sedang berjalan saat ini sering mendapat kendala karena belum adanya suatu aplikasi yang dapat mengirimkan data dari kelurahan ke kecamatan yang menyebabkan proses penyampaian laporan bulanan dari RT dan RW sekitar ke kantor Kelurahan mendapat kesulitan.

4.3.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

a. Visi

Visi Kelurahan Sidomulyo Barat adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya kelurahan Sidomulyo Barat sebagai tempat pemukiman yang bersih, tertib, aman dan harmonis”.

b. Misi

Adapun **MISI** Kelurahan Sidomulyo Barat yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan kelembagaan di lingkungan kelurahan Sidomulyo Barat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang produktif, kreatif dan inovatif.
4. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Terwujudnya lingkungan bersih, Indah, Tertib dan Hijau.

4.3.3. Kondisi Geografi Kelurahan Sidomulyo Barat

Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat 101° 22' 45" BT – 101° 23' 09" BT dan 0° 28' 41" LU – 0° 29' 09" LU memiliki luas wilayah 13,69 km² / 22,89 % dari luas Kecamatan Tampan. Sebagian

besar wilayah digunakan untuk perumahan dan sekolah. Adapun batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat adalah:

- Sebelah Utara : Kelurahan Tobek Godang
- Sebelah Selatan : Siak Hulu Kampar
- Sebelah Barat : Kelurahan Sialang Munggu
- Sebelah Timur : Kelurahan Maharatu & Sidomulyo Timur

Kondisi iklim dan cuaca di kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6 0-35,0 C dengan rata-rata 28.0 C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9% - 93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th – 4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari.

Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September dengan Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 mdpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

Masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, hidup rukun

dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat dan lain sebagainya.

Berikut data Fasilitas Umum, Pendidikan, Tempat Ibadah dan Lainnya di Kelurahan Sidomulyo Barat:

Tabel 4.4
Jumlah Fasilitas di Kelurahan Sidomulyo Barat

| No | Jenis Fasilitas Umum | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1. | Taman Kanak-Kanak (TK) | 7 |
| 2. | Sekolah Dasar (SD) | 6 |
| 3. | Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ MTS | 4 |
| 4. | Sekolah Mennagh Atas (SMA)/ MAN | 2 |
| 5. | Universitas | - |
| 6. | Mesjid | 32 |
| 7. | Mushollah | 18 |
| 8. | Gereja | - |
| 9. | Klinik | 9 |
| 10. | Warnet | 12 |
| 11. | Karaoke | - |
| 12. | Hiburan | - |
| 13. | Biliar | - |
| 14. | Perumahan | 15 |
| 15. | Kuliner | 4 |
| 16. | Dialer | 2 |
| 17. | Sorum | 3 |
| 18. | Hotel | - |
| 19. | Wisma | - |
| 20. | Kos-kosan | 30 |
| 21. | Jalan Nasional | 3 |

Sumber : Kantor Lurah Sidomulyo Barat, 2019.

4.3.4 Sumber Daya Manusia Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kelurahan, berjumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. | PNS/ ASN | 1 | 7 | 8 |
| 2. | THL | 1 | 1 | 2 |
| | Jumlah | 2 | 8 | 10 |

Sumber : Kantor Lurah Sidomulyo Barat, 2019.

Tabel 4.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status ASN

| No | Jabatan | Status | Jumlah |
|----|---------|--------|--------|
| 1. | Lurah | ASN | 1 |
| 2. | Seklur | ASN | 1 |
| 3. | Kasi | ASN | 3 |
| 4. | Staf | ASN | 3 |
| 5. | Staf | THL | 2 |
| | Jumlah | | 10 |

Sumber : Kantor Lurah Sidomulyo Barat, 2019.

Berdasarkan kondisi pada tabel jumlah pegawai diatas, memang sangat dibutuhkan pegawai yang memiliki kinerja yang baik sehingga seluruh jenis pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga dalam mendukung tugas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dibutuhkan kemampuan kerja yang tinggi, sebab dengan kemampuan kerja yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi pula.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Penyajian Data Informan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun informan Kunci dalam penelitian ini adalah Pejabat Struktural Bappeda Kota Pekanbaru, Camat Tampan dan Lurah Sidomulyo Barat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat, sedangkan Informan Utama dalam penelitian ini yaitu: mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, yaitu RW, Pendamping PMB-RW Kelurahan serta Masyarakat/peserta di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) orang.

Adapun karakteristik informan dalam penelitian Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diidentifikasi berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

5.1.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.1
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Laki-Laki | 10 Orang |
| 2. | Perempuan | 5 Orang |
| TOTAL | | 15 Orang |

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Agustus 2019

Jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari Kabid Perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Kota Pekanbaru, Kasubbid Perekonomian dan Investasi Bappeda Kota Pekanbaru, Lurah Sidomulyo Barat, serta Pendamping PMB RW Kelurahan Sidomulyo Barat, sedangkan informan perempuan 5 (lima) orang terdiri dari Camat Tampan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pendamping PMB RW, serta masyarakat dan peserta PMB RW Kelurahan Sidomulyo Barat.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya.

Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 5.2
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan tingkat pendidikan

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 2 Orang |
| 2. | Sarjana (S1) | 2 Orang |
| 3. | SMA dan atau Setingkatnya | 11 Orang |
| TOTAL | | 15 Orang |

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Agustus 2019

Adapun tingkat pendidikan dari keseluruhan informan ialah, informan yang berlatar belakang Strata 2 berjumlah 2 (dua) orang yaitu Kasubbid Perekonomian dan Investasi Bappeda Kota Pekanbaru dan Lurah Sidomulyo Barat, sedangkan informan yang berlatar belakang Strata 1 berjumlah 2 (orang) orang terdiri dari Camat Tampan dan Kabid Perekonomian dan Pemerintahan, selanjutnya informan berlatar belakang SMA/ Sederajat berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, para pedamping PMB RW serta masyarakat/ peserta PMB RW Kelurahan Sidomulyo Barat.

Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang SMA dan atau setingkatnya sangat mendominasi.

5.1.3. Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berfikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menentukan

hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung pula dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5.3
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Umur

| No | Tingkat Umur | Jumlah |
|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 20-30 tahun | 4 |
| 2 | 30-40 tahun | 7 |
| 3 | 40-50 tahun | 3 |
| 4 | Diatas 50 tahun | 1 |
| Jumlah | | 15 |

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Agustus 2019

Dari tabel 5.3 tersebut diatas dapat dilihat bahwa, responden pada Kelurahan Sidomulyo Barat yang jumlah usia paling banyak adalah yang berumur 30-40 tahun yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian yang berumur 20-30 tahun sebanyak 4 (empat) orang, kemudian yang berumur 40-50 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan untuk yang berumur diatas 50 tahun sebanyak 1 (satu) orang.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dimulai dari sejauh mana peran dan dukungan dari pimpinan, yaitu Camat, Bapak Lurah, Bapak Rukun Warga, Bapak Rukun Tetangga, Pendamping PMB RW dan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Maksudnya salah satu tujuan dari PMB RW di Kecamatan Tampan adalah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan agar tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri atau tujuan yang paling minimal mampu menolong untuk diri sendiri masyarakat di kota Pekanbaru.

Fenomena yang terjadi dalam program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan sebagai percontohan yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap masyarakat belum maksimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program dan memiliki keterampilan sesuai dengan konsep pemberdayaan. Dalam pemahaman masyarakat bukan harapan memiliki keterampilan baru yang pada akhirnya memberikan perubahan dari sisi ekonomi lebih mandiri namun kenyataannya kegiatan ini seperti tidak tepat sasaran baik dari pelatihan bengkel motor, bengkel las, tata boga, membatik dan lain-lain.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Kartasmita dalam Mardikanto, 2013:163). Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung pada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya.
2. Pembedayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan bahwasanya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sejalan dengan pendapat tersebut diatas bahwa pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Strategi pada

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PMB RW ini meliputi antara lain program pelatihan dan pembangunan berbentuk fisik.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaannya dilihat dari pendekatan pembangunan melalui PMB-RW difokuskan kepada pembangunan wilayah Rukun Warga dengan pendekatan yang dikenal nama generiknya adalah "TRI DAYA" yaitu:

- 1) Pemberdayaan Sosial
- 2) Pemberdayaan Ekonomi
- 3) Pemberdayaan Lingkungan

Kegiatan PMB-RW pada prinsipnya merupakan kegiatan pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang dianggarkan melalui instansi terkait dan pendanaannya berasal dari berbagai sumber, yaitu digunakan untuk:

1. Pemberdayaan Sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat;
2. Pemberdayaan Ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera;
3. Pemberdayaan Lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kunci dan informan utama, pengetahuan responden tentang indikator-indikator pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi produktif dan aspek penataan kawasan dan lingkungan, sebagai berikut:

5.2.1 Berdasarkan Aspek Sosial dan Kependudukan

Sasaran pemberdayaan masyarakat pada aspek sosial dan kependudukan adalah terciptanya kondisi masyarakat yang mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam komunitasnya untuk kemudian dilakukan pemecahan masalahnya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki serta dengan memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin didapatkan. Permasalahan sosial yang dimaksud meliputi kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Adapun Sub Indikator dari aspek sosial dan kependudukan meliputi: Membangun sarana Kesehatan dan Membangun sarana keamanan Intelektual. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Peneliti memberikan pertanyaan kepada **Informan Kunci** yaitu Pejabat Struktural

Bappeda Kota Pekanbaru, Camat Tampan dan Lurah Sidomulyo Barat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat.

Mengenai Pertanyaan tentang pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga jika dilihat dari aspek sosial di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil pemetaan swadaya sebelumnya, namun dokumen perencanaan seharusnya memuat secara lebih detail skenario dan strategi pelaksanaannya. Strategi dan skenario yang dimaksud adalah sebagai panduan dalam melakukan prioritas dan acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial sehingga sasaran yang direncanakan benar-benar dapat tercapai, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai potensi program PMB RW yang masih belum dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil wawancara dengan Bapak Hendry Safitrah, SH.,MH, selaku Lurah Sidomulyo Barat, dia menjelaskan, bahwa:

“Saya merespon positif program PMB RW yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan tujuan Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Yang merupakan program Kota Pekanbaru bukan hanya sekedar membagikan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) saja kepada masyarakat. Namun juga merupakan wadah pembelajaran bagi masyarakat terhadap nilai dan etika yang luhur. Masyarakat dibimbing untuk membangun kemitraan dalam mewujudkan keinginan bersama dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan kemandirian.” (wawancara tanggal 20 Agustus 2019)

Pada sub-indikator ini sosial dan kependudukan ini dapat berarti kemasyarakatan. Pada Program PMB-RW di Kecamatan Tampan perubahan sosial masyarakat tidak begitu berpengaruh. Karena kegiatan dalam Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan menurut peneliti hanya Program yang bersifat pembelajaran dasar. Program PMB-RW tersebut tidak meningkatkan taraf hidup manusia dari derajat kelas sosial dalam masyarakat. Karena pada dasarnya program tersebut memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat, Hasil wawancara peneliti dengan Desmardeti, ia menjelaskan:

“Program PMB-RW belum berpengaruh terhadap tingkat sosial masyarakat. Karena PMB-RW ini kegiatannya hanya sekedar pelatihan dan pembangunan fisik, jadi menurut saya kelas sosial masyarakat tidak berubah, bagaimana mau berubah kalau misalkan yang mengikutinya belum meningkatkan ekonomi”.
(wawancara tanggal 24 Agustus 2019)

Pertanyaan selanjutnya mengenai Pada Program PMB-RW di Kecamatan Tampan dalam pelaksanaan dari tahun-tahun sebelumnya belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. sebentar saja. Kegiatan tersebut hanya berupa kepelatihan dan pembangunan bersifat fisik, tanggapan Camat Tampan dalam wawancara peneliti Ibu Hj. Liswarti, menjelaskan:

“Program PMB-RW dikatakan berhasil atau tidak terhadap perekonomian masyarakat khususnya warga tampan ha tersebut mempunyai tanggung jawab dari yang diberikan. Pada Program PMB-RW ini memiliki organisasi pelaksana yaitu dari Tim koordinasi Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan, butuh kerjasama

untuk benar-benar bermanfaat sesuai tujuan yang diinginkan, memang sekarang belum kelihatan secara signifikan, akan tetapi pengetahuan dari masyarakat tersebut sudah bertambah dengan mengikuti pelatihan". (wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan juga terlihat dari tingkat kekritisn warga dalam menyampaikan usulan atau kritik terhadap program-program yang dijalankan. Meskipun apabila dilihat secara lebih dekat dapat diketahui bahwa warga yang kritis hanya personil itu-itu saja yang notabene merupakan kelompok elite warga yang antara lain terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pegawai, namun adanya kelompok warga yang kritis bisa dijadikan sebagai pendorong dan pemacu serta sumber pembelajaran bagi anggota masyarakat yang lain untuk lebih peduli terhadap permasalahan dalam komunitasnya.

Pertanyaan selanjutnya masih untuk indikator sosial dan Kependudukan mengenai sub indikator dalam membangun sarana keamanan Intelektual yaitu tentang, Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan memiliki dampak terhadap intelektual masyarakat yang mengikutinya. Kegiatan pada program PMB-RW merupakan suatu kegiatan yang meningkatkan intelektual masyarakat

yang mengikutinya, bagaimana hasil dari kegiatan tersebut dalam membangun sarana keamanan Intelektual.

Hasil wawancara peneliti dengan **Informan Utama** yaitu RW, Pendamping PMB-RW Kelurahan serta Masyarakat/peserta di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat koordinasi sudah dilaksanakan dengan matang. Sudah menginformasikan kepada masyarakat, bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program tersebut. Pendamping PMB RW Kelurahan Sidomulyo Barat Bapak Ramli Menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat yaitu Pelaksanaan Program yang merujuk pada pemberdayaan masyarakat yang memiliki cakupan yang lebih kecil, sehingga masyarakat dari RW bisa mengikuti kegiatan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat.” (wawancara tanggal 27 Agustus 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pendamping PMB-RW Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengenai bagaimana hasil dari program PMB RW dalam membangun sarana keamanan Intelektual, ibu Murniati yang melakukan proses pendampingan pada saat adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, ia mengatakan:

“Pengetahuan masyarakat yang mengikuti menurut saya bertambah, tapi masih belum bisa dipraktekkan dalam bekerja atau membuka usaha. Karena praktek yang masih kurang dan terlalu cepat. Pembelajarannya belum begitu dipahami lebih jelas”. (wawancara tanggal 26 Agustus 2019)

Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Ketua RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada bulan Agustus tanggal 27-30 Agustus 2019:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama Berdasarkan Aspek Sosial dan Kependudukan

| Indikator 1 | Sub Indikator 2 | Pertanyaan 3 | Hasil Wawancara 4 |
|-------------------------|---|---|--|
| Sosial dan Kependudukan | a. Membangun sarana Kesehatan b. Membangun sarana keamanan Intelektual | Menurut Bapak/Ibu, sebagai seorang RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, apakah program PMB RW disini membangun sarana kesehatan dan sarana keamanan? Bagaimana dalam pelaksanaannya terhadap masyarakat? | <p>Sejauh yang saya lihat sampai saat ini untuk pembangunan sarana kesehatan tidak ada, hanya saja peningkatan untuk posyandu dari pihak PKK ada, sedangkan pembangunan sarana keamanan, kami sebagai RW disini telah membangun pos kambling dimasing-masing RT, dalam pelaksanaannya masyarakat cukup mengikuti dengan baik. (Bapak Subagio, Ketua RW 15 Kelurahan Sidomulyo Barat)</p> <p><i>Program PMB RW yang dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan ini tidak ada pembangunan berbentuk fisik, saya tidak tau dari pihak kelurahannya kenapa, tetapi kalau untuk keamanan kita memang sudah ada di tiap RT. (Bapak Agus Prasetyo Hutomo, S.K, Ketua RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, dalam pelaksanaan PMB RW masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak kecamatan ataupun dari Bappeda Kota Pekanbaru, untuk pembangunan sarana kesehatan tidak ada, tetapi posyandu berjalan dengan baik. Untuk keamanan sudah ada pos kambling di lingkungan kami. (Bapak Zainuddin, Ketua RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> |

Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2019.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan Utama tersebut tentang aspek social dan kependudukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi juga nampak dari program-program yang sifatnya general dan tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja, hal ini dapat terlihat dari program pembangunan kesehatan dan keamanan berupa kegiatan posyandu yang lebih mengutamakan pemerataan untuk semua RT. Dilihat dari sasaran program hal ini sudah tepat karena sebenarnya kelompok sasaran utama dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, sehingga prioritas dalam menentukan kegiatan seharusnya mengacu pada kegiatan yang dampaknya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat secara langsung.

Salah satu program yang telah dilakukan oleh PMB RW Kelurahan Sidomulyo Barat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini adalah dengan telah mengadakannya pelatihan. Tujuan diberikan pelatihan ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat menggali kemampuan yang ada dalam diri mereka serta siap mandiri untuk memperoleh masa depan yang cerah dan berguna bagi dirinya, masyarakat dan bangsa, seperti wawancara peneliti kepada masyarakat/peserta PMB RW yang mebibuti pelatihan sebagai informan utama, sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Masyarakat/ Peserta yang mengikuti pelatihan Program PMB RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Berdasarkan Aspek Sosial dan Kependudukan

| Indikator 1 | Pertanyaan 3 | Hasil Wawancara 4 |
|--------------------------------|--|---|
| Sosial dan Kependudukan | <p>Menurut Bapak/Ibu, tujuan pelatihan dalam program PMB RW ini untuk membekali masyarakat dengan keahlian agar mampu hidup mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain karena pada pelatihan ini yang menjadi intervensi mediana adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengikuti pelatihan, agar mereka dapat mengembangkan keahliannya tersebut dengan ilmu yang ia pelajari?</p> | <p><i>Dengan adanya program pelatihan menjahit, daur ulang dan yang lainnya di kelurahan Sidomulyo Barat ini, perasaan saya senang banget dengan adanya pelatihan saya bisa mengikutinya, mumpung gratis, kapan lagi saya bisa belajar menjahit. (Ibu Susilawati, Warga RW 07 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Manfaatnya yang saya ikuti dalam pelatihan banyak sekali, diantaranya kemampuan saya semakin berkembang setelah saya mengikuti pelatihan. Awalnya saya tidak bisa tapi dengan cara berlatih terus lama- kelamaan saya bisa. Apalagi sekarang saya sudah lulus sekolah, kalo tidak saya manfaatkan maka saya akan rugi, zaman sekarang kan kalo mau melamar pekerjaan harus bisa dan punya keahlian. (Ibu Lia Septika Putri, Warga RW 08 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Tujuan program pelatihan yang diadakan Kelurahan ini sangat membantu kami dalam menambah pengetahuan, hanya saja setelah pelatihan selesai, biasanya kami tidak punya dana untuk lanjut meneruskannya. (Ibu Nanik Herawati, Warga RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam program PMB RW ini tentunya menambah wawasan say, hanya saja Kegiatan juga berjalan tiap tahunnya hanya itu-itulah saja. Tidak berinovasi dan kreatif (Ibu Sri Yuspa Dewi, Warga RW 01 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Program PMB-RW berjalan dengan baik, dari Sosialisasi RW dan Pelatihan yang berlangsung. Pengajarannya sangat dimenerti. untuk komunikasi saya rasa bagus-bagus saja. (Ibu Juliana, Warga RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> |

Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2019.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan berpengaruh terhadap intelektual atau menambah pengetahuan masyarakat yang mengikutinya. Program PMB-RW tersebut menambah pengetahuan masyarakat sesuai kegiatan yang mereka ikuti, Akan tetapi belum berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mengikutinya. Kemampuan yang dimiliki tidak bisa dilaksanakan sebagai mata pencaharian karena tidak memiliki modal.

Motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik secara umum cukup tinggi, dimana masyarakat bersedia secara sukarela terlibat dan menjadi bagian dari program tanpa upah atau insentif apapun. Namun dilihat dari aspek kemandirian maka motivasi yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari adanya keluhan terhadap berkurangnya peran fasilitator kelurahan pada tahun kedua.

Sesuai dengan program dan kebijakan dari koordinator manajemen wilayah pada tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah fasilitator sehingga intensitas pertemuan dan interaksi antara fasilitator dengan masyarakat berkurang yang menyebabkan intensitas masyarakat untuk mengelola program juga berkurang, sehingga bisa dikatakan masyarakat masih belum cukup mandiri dan masih memerlukan dukungan dari pihak lain untuk menjaga agar motivasi yang dimiliki masyarakat tidak padam atau hilang.

Pada Program PMB-RW di Kecamatan Tampan, partisipasi berguna atau bermanfaat untuk masyarakat agar meningkatkan kemandirian masyarakat yang dijelaskan pada indikator pertama yaitu meningkatkan perekonomian, sosial dan intelektual

Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara bersama Camat Tampan Ibu Hj. Liswarti, menjelaskan:

“Sebenarnya Program PMB-RW kalau berjalan dengan baik sangat bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi sejauh ini kegiatannya hanya pelatihan dasar dan belum didalami dari segi teori maupun praktek. Karena sangat minimnya dana anggaran untuk menjalankan program tersebut sehingga pelatihan hanya berlangsung sebentar saja. Tidak bisa memberikan pelatihan yang focus dan mendalam”. (wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

Sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam PMB RW masih kurang bermanfaat, disamping itu masyarakat juga menyatakan ketidakpuasan setelah mengikuti pelatihan yang berdampak pada dana yang akan digunakan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

5.2.2. Berdasarkan Aspek Ekonomi Produktif

Pada Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan dalam pengamatan peneliti yaitu belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. sebentar saja, Kegiatan tersebut hanya berupa kepelatihan dan pembangunan bersifat fisik. dengan Sub Indikator Sumber Daya meliputi: Melakukan Sosialisasi dan pelaksanaan untuk membentuk usaha Kelas Menengah dan Membangun koperasi untuk melakukan Simpan Pinjam Dana.

Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat yang mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun kapasitas produktif masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan.

Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pengamatan peneliti yaitu belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan pada Pelaksanaan program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat belum tercapai dengan baik. Kegiatan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat hanya berlangsung sebentar saja. Kegiatan tersebut hanya berupa kepelatihan.

Peneliti memberikan pertanyaan tentang indikator Ekonomi produktif kepada **Informan Kunci** yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat dan Lurah Sidomulyo Barat mengenai apakah Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya walaupun hanya berbentuk kegiatan berupa kepelatihan.

Hasil wawancara peneliti dengan Desmardeti, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat, ia menjelaskan:

“Kalau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat saya rasa program PMB-RW belum berpengaruh terhadap itu. Karena PMB-RW ini kegiatannya hanya sekedar pelatihan dan pembangunan fisik. Sifat pelatihannya juga seperti kilat, hanya pelatihan tersebut berlangsung tidak sampai seminggu”. (wawancara tanggal 24 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW. Pelaksanaan Program ini hanya berlangsung beberapa hari saja, dan tidak menjadikan sebagai kegiatan yang merubah status atau kelas sosial masyarakat yang mengikutinya.

Berbasis RW dalam program ini dimaksud dari perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan ditingkat RW. Berbasis RW ini untuk mengetahui permintaan di setiap RW. Dari permintaan tersebut nantinya akan di utamakan mana yang lebih harus di prioritaskan untuk dijalankan kegiatannya. Hal tersebut mengingat anggaran yang ada tidak bisa memenuhi semua permintaan kegiatan yang diminta pada setiap RW.

Proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya, setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan

kesadaran masyarakat yang akan penting mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki peserta dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kecamatan Tampan. Langkah pemberdayaan masyarakat telah diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya.

Pada sub-indikator ini yaitu membahas mengenai informasi dalam jaringan kerja pada Program PMB-RW di Kecamatan Tampan. Informasi sebagai pesan sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan secara langsung pada program PMB-RW di Kecamatan Tampan.

Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Liswarti, selaku Camat Tampan, dia menjelaskan, bahwa:

“Pendapat saya mengenai langkah nyata yaitu sesuai dengan disetujuinya dan dikeluarkan peraturan mengenai PMB-RW. Sudah jelas dasar hukum pada Program PMB-RW ini. dan tujuan dari program juga saya rasa baik, untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatannya. Jadi semua masyarakat boleh berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan”. (wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara peneliti bersama Camat Tampan, dapat dianalisis bahwa Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah jelas dasar hukumnya. Adanya keadilan legal yaitu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama.

Untuk pertanyaan selanjutnya masih untuk indikator ekonomi produktif ditujukan pada tenaga pendamping Pada Program PMB-RW di Kecamatan Tampan memiliki partisipasi tenaga pendamping. Tenaga pendamping memiliki tugas mendampingi setiap kelurahan dalam kegiatan PMB-RW.

Lebih lanjut berbicara mengenai tenaga pendamping Hasil wawancara peneliti dengan Lurah Sidomulyo Barat, Bapak Hendry Safitrah, SH, MH, ia mengatakan:

“tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap prioritas-prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pun tenaga pendamping mempunyai tugas untuk mengawasi keberlangsungan kegiatan tersebut. Tenaga pendaamping berasal dari sarjana dan diberikan honor”. (wawancara tanggal 20 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat terlaksana dengan petunjuk teknis dan memiliki tenaga pendamping. Tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk menentukan kegiatan yang harus di prioritaskan dan mengawasi berjalannya Program PMB-RW di Kecamatan Tampan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti, dijelaskan oleh Pendamping PMB-RW Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengenai Program PMB-RW di Kecamatan Tampan memiliki partisipasi tenaga pendamping. Tenaga pendamping memiliki tugas mendampingi setiap kelurahan dalam kegiatan PMB-RW, bagaimana cara

tenaga pendamping dalam memberikan arahan kepada masyarakat tentang program PMB RW, Ibu Murniati selaku tenaga pendamping di Kelurahan Sidomulyo Barat, menjelaskan:

“hal pertama yang akan kita lakukan sebagai pendamping kelurahan adalah dengan pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya”.
(**wawancara tanggal 26 Agustus 2019**)

Setiap kelurahan diberikan satu tim pendamping yang nantinya akan memberikan arahan terhadap ketua RW. Alasan mempekerjakan tenaga pendamping dalam Program PMB-RW ini mengingat latar belakang pendidikan ketua RW di Pekanbaru sangat beragam. Untuk itu perlu pendamping untuk mengarahkan RW penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran.

Dana yang disalurkan tidak dikelola secara sendiri oleh RW penerima bantuan. Selain itu tenaga pendamping, Lembaga Keswadayaan Masyarakat RW (LKM-RW) yang dipercayai sebagai pemegang Dana PMB-RW bersama RW. LKM-RW mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Pedoman Umum dan Pelaksanaan PMB-RW adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi perencanaan partisipatif melalui tahapan dan siklus PMB-RW;
- b. Melakukan musyawarah untuk membuat Peta Rona Rukun Warga;
- c. Melakukan validasi Data Kependudukan dan mengelompokan/mengkaji masing-masing persoalan penduduk;

- d. Melakukan musyawarah untuk merumuskan Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK RW) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya;
- e. Melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Pembangunan Kelurahan;
- f. Ketua LKM-RW menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan konstruktif yang diwakelolakan;
- g. Tim yang dimaksud pada poin f ditetapkan berasal dari warga dilingkungan RW dan berdasarkan musyawarah;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Pengurus LKM RW dibantu/difasilitasi oleh Pendamping Kelurahan. Hal serupa disampaikan oleh tenaga pendamping PMB RW

Kelurahan Sidomulyo Barat Bapak Ramli Menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya kami selaku tenaga pendamping mempunyai tugas untuk mengawasi keberlangsungan kegiatan tersebut dan harus berkoordinasi dengan Kecamatan bagaimana tentang kegiatan yang berjalan tersebut.” (wawancara tanggal 27 Agustus 2019)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Kota Pekanbaru, berbicara mengenai tenaga pendamping, disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program PMB RW Kota Pekanbaru, ia menjelaskan bahwa:

“Agar pelaksanaan program berjalan lancar, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan tenaga pendamping sebanyak 128 orang yang diambil dari kalangan sarjana melalui seleksi ketat. Sarjana pendamping yang terpilih akan bekerja selama satu tahun untuk 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru”. (wawancara tanggal 30 Agustus 2019)

Alasan mempekerjakan tenaga pendamping dalam program PMB RW ini mengingat latar belakang pendidikan ketua RW di Pekanbaru sangat beragam. Untuk itu perlu pendamping untuk mengarahkan RW penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat

sasaran. Pemerintah Kota Pekanbaru, berharap melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis RW ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas maupun untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kasubbid Perekonomian dan Investasi Bappeda Kota Pekanbaru, bapak Ardiani Yusra, SE, MM, bahwa PMB RW pada prinsipnya merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya masyarakat akan timbul peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru.

Berbicara mengenai Dana yang disalurkan tidak dikelola secara sendiri oleh RW penerima bantuan. Selain didampingi tenaga pendamping, RW juga akan diarahkan oleh Organisasi Masyarakat Sekitar (OMS), yang dipercayai mengelola dana PMB RW bersama RW. PMB RW bukanlah program yang dibuat serta merta asal jadi. Akan tetapi sudah melalui pemahaman yang komprehensif dan kajian yang mendalam terhadap kondisi riil masyarakat Pekanbaru terutama menghadapi perkembangan tantangan yang semakin besar.

Kepala Bidang perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Kota Pekanbaru, Bapak Adrizal, SE menjelaskan lebih lanjut:

“Pada tahun ini, program PMB-RW sendiri akan dilaksanakan di seluruh kecamatan, namun tidak di seluruh RW. Hal ini berbeda dengan pencanaan tahap awal lalu, yang mana dana PMB RW hanya dikhususkan bagi RW yang berada di Kecamatan Tampan”.
(wawancara tanggal 30 Agustus 2019)

Pada dasarnya Program yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru ini sistemnya sama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang sudah ditiadakan sejak tahun lalu. Namun, yang membedakan dari program ini yaitu dalam lingkungannya, yaitu dalam program PMB-RW ini menjangkau masyarakat miskin hingga tingkat Rukun Warga, pelaksanaan PMB-RW ini di tanggung jawab oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

Program PMB-RW ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Sana Belanja Daerah (APBD). Dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk setiap Rukun Warga yaitu Rp. 50 Juta. Adapun dasar hukum yang melandasi terhadap pelaksanaan PMB-RW antara lain yaitu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan wali kota Nomor 44 Tahun 2014 tentang PMB-RW Kota Pekanbaru yang dikeluarkan pada 12 Mei 2014 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016.

Agar program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) ini tepat sasaran, maka pemerintah kota pekanbaru dalam hal ini melakukan pelatihan kepada para pendamping dimana pendamping ini merupakan lulusan sarjana dan dalam penyeleksiannya dilakukan secara ketat, ini dikarenakan anggaran dana dari program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini akan diluncurkan langsung kepada pada tingkat yang paling bawah yang mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kepala Bidang perekonomian dan Pemerintahan Bappeda Kota Pekanbaru, Bapak Adrizal, SE menjelaskan bahwa setiap RW memiliki hak untuk mendapatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dimana didalam Program Tersebut terdapat 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) aspek sosial dan kependudukan dimana aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
- 2) aspek Ekonomi Produktif yaitu bertujuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan selanjutnya yang ketiga yaitu aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan yang terwujud dalam pembahasan infrastruktur.

Dengan adanya aspek-aspek diatas maka pemerintah Kota Pekanbaru berharap bahwa Rukun Warga Kecamatan Tampan dapat melakukan Program tersebut dengan baik dan sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan

Kasubbid Perekonomian dan Investasi Bappeda Kota Pekanbaru, bapak Ardhiani Yusra, SE, MM, menjelaskan lebih lanjut bahwa didalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini, pemerintah kota pekanbaru telah melakukan di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Tampan. Diantara tiga kecamatan tersebut kecamatan Tenayan raya mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga dengan yang

diharapkan oleh pemerintah kota pekanbaru, begitu juga dengan Kecamatan Lima Puluh walaupun ada beberapa Rukun warga yang belum melaksanakan akan tetapi hal ini tertutupi dengan banyaknya Rukun warga yang telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Dalam hal ini Kematan Tampan menjadi satu diantara tiga kecamatan tersebut yang paling banyak rukun warganya yang tidak melaksankan program pemberdayaan masyarakat bahkan ada salah satu Kelurahan yang tidak sama sekali melaksanakannya.

Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan merupakan dana yang di dapati dari Pemerintah Kota, seperti wawancara peneliti kepada masyarakat/ peserta PMB RW yang mengikuti pelatihan sebagai informan utama, sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Masyarakat/ Peserta yang mengikuti pelatihan Program PMB RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Berdasarkan Aspek Ekonomi Produktif

| Indikator 1 | Pertanyaan 3 | Hasil Wawancara 4 |
|--------------------------|---|--|
| Ekonomi Produktif | Menurut Bapak/Ibu, setelah selesai diadakan pelatihan, apakah ada suatu bentuk bantuan dana yang diberikan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat agar dapat mengembangkan hasil dari pelatihannya untuk keberlanjutan yang lebih mandiri? | <p><i>Setelah saya mengikuti pelatihan ini, masalah dana sampai saat ini belum adanya bantuan dari pihak terkait, kita hanya disuruh mengikuti pelatihan saja. (Ibu Susilawati, Warga RW 07 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Tidak, setelah kita mengikuti pelatihan, tidak ada diberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha yang kami ikuti pelatihan. (Ibu Lia Septika Putri, Warga RW 08 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Selama saya mengikuti pelatihan memang tidak dipungut biaya sama sekali, tetapi setelah pelatihan selesai kami tidak ada diberikan dana untuk emngembangkan pelatihan yang sudah diberikan. (Ibu Nanik Herawati, Warga RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p><i>Sejauh ini tidak pernah saya diberikan bantuan dana, yang ada hanya diberi pelatihan saja, makanya setelah pelatihan ya keadaan tetap gitu aja (Ibu Sri Yuspa Dewi, Warga RW 01 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Dan tidak ada, yang diberikan hanya berbentuk pelatihan, mulai dari menjahit, Hidroponik, Tata boga, mendesain, kerajinan tangan dan sebagainya. (Ibu Juliana, Warga RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> |

Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2019.

Dari hasil wawancara diatas, bahwa pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat baik untuk di pertahankan dan dilanjutkan dan memiliki tujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan pengetahuan, hanya saja perlu perhatian khusus pihak terkait untuk membantu masyarakat miskin yang memang membutuhkan bantuan dana untuk melanjutkan usahanya setelah mengikuti pelatihan tersebut. Keberlanjutan program PMB RW merupakan suatu kegiatan terus-menerus yang memungkinkan Terpenuhi kebutuhan dasar lainnya. Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat sebenarnya sangat bagus bila terlaksana dengan baik. Dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pengevaluasian.

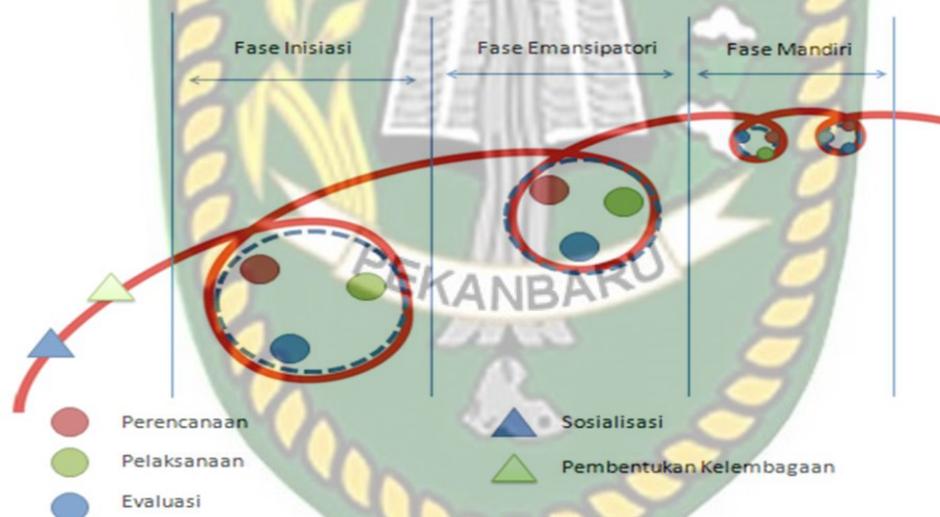
Adapun tahap Tahap Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program PMB RW di Kelurahan Sidomulyo Barat diawali dengan:

- 1) Lokakarya/Sosialisasi tingkat Kota Pekanbaru
- 2) Lokakarya/Sosialisasi tingkat Kecamatan

- 3) Sosialisasi tingkat Kelurahan
- 4) Sosialisasi Tingkat Rukun Warga
 - a) Sosialisasi Program PMB – RW
 - b) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk melaksanakan perencanaan partisipatif melalui Siklus PMB-RW

Tahapan Perencanaan Partisipatif Siklus Program PMB–RW. Merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan tahapan Siklus Program PMB-RW yaitu berpedoman kepada fase pemberdayaan yaitu pada gambar 5.1 berikut ini:

Gambar 5.1
Siklus Program PMB-RW



Dapat dijelaskan pada gambar 5.1 diatas, bahwa tahap awal yang dilakukan dalam fase inisiasi adalah perencanaan awal yang dikuti oleh pelaksanaan serta dilakukan evaluasi, berikut grafik selanjutnya pada fase Emansipatori dan fase mandiri, tahap awal yang dilakukan adalah pembentukan kelembagaan dan sosialisasi.

Selanjutnya pertanyaan tentang Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) adalah lembaga yang dibentuk

masyarakat sebagai wadah yang dipercaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui program PMB RW, apakah sudah terbentuk LKM-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Hasil wawancara peneliti dengan Lurah Sidomulyo Barat, Bapak Hendry Safitrah, SH, MH, ia mengatakan:

“saya tau tentang LKM-RW, tetapi di Kelurahan Sidomulyo Barat belum pernah diadakan pembentukan LKM-RW baik itu secara musyawarah ataupun secara penunjukkan langsung, hal ini mungkin dikarenakan tidak disosialisasikannya Perwako tentang pelaksanaan dan petunjuk teknis PMB RW di Kelurahan”.
(wawancara tanggal 20 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara peneliti bahwa tidak dibentuknya LKM-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan hal yang sangat disayangkan, karena sudah tertera didalam Perwako 44 Tahun 2014 tentang Program PMB RW Kota Pekanbaru, bahwa LKM RW itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan PMB RW tersebut, lebih lanjut dijelaskan juga didalam Perwako Nomor 32 Tahun 2019 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis kegiatan PMB RW Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa LKM RW sebagai wadah untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui program PMB RW.

Di perjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 10 bahwa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lebih lanjut dalam Pasal 14 disebutkan Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- 1) peningkatan pelayanan masyarakat;

- 2) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- 3) pengembangan kemitraan;
- 4) pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- 5) peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Hal senada juga diperlukan dalam PMB RW dalam pembentukan LKM RW, pada tahap pembentukan LKM RW, dalam tahapan ini adalah melaksanakan tahapan Intervensi pembentukan atau Revitalisasi LKM-RW di masing-masing Rukun Warga, sebagaimana tergambar dalam matrik di bawah ini:

Tabel 5.7
Tahapan Pembentukan LKM RW

| No | Tahapan | Musyawarah | | Out Put Pembentukan LKM - RW |
|----|---|--|--|--|
| | | Tingkat RT. | Tingkat RW. | |
| 1 | Musyawarah Pembentukan atau Revitalisasi LKM-RW | Utusan Calon Pengurus LKM-RW dari masing – masing RT | Pemilihan Pengurus LKM – RW Tingkat RW, sedangkan Untuk Ketua Secara otomatis adalah Ketua RW. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan 2. Surat Keputusan Pembentukan kepanitiaan oleh RW. 3. Tertib Pemilihan Calon LKM – RW di Tingkat RT dan daftar Hadir. 4. AD/ART LKM – RW dicatatkan di Notaris. 5. Berita Acara Penetapan Pengurus LKM – dan daftar hadir. 6. Foto Kegiatan (Soft Copy dan Hard Copy). 7. Surat Keputusan Lurah tentang penetapan pengurus LKM-RW |

Sumber : Kantor Camat Tampan, 2019.

Sedangkan Fasilitator program PMB RW terdiri dari:

1. Struktur Tim Fasilitator adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinator Kota;
 - b. Bidang Umum dan Pengembangan Kapasitas;
 - c. Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan;
 - e. Pendamping.

- 2 Struktur Tim Fasilitator dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan;
- 3 Tim fasilitator bertugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan dan bimbingan kepada LKM-RW dalam melaksanakan sosialisasi, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PMB-RW di lingkungan RW;
 - b. Membantu LKM-RW dalam penataan dan pelaksanaan administrasi kegiatan PMB-RW, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Bersama LKM-RW melakukan pengumpulan data, validasi data, dan *up date* data sosial, ekonomi dan lingkungan, serta peta rona lingkungan;
 - d. Membantu pelaksanaan koordinasi kegiatan PMB-RW dengan semua pihak terkait;
 - e. Membantu LKM-RW dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan RW;
 - f. Membantu LKM-RW dalam melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Kegiatan Pemberdayaan (RKP) RW berdasarkan kebutuhan;
 - g. Membantu LKM-RW dalam melakukan pembinaan, pemasaran, dan pengembangan usaha alumni kegiatan pelatihan pemberdayaan (PMB-RW) melalui Koperasi;
 - h. Membantu LKM-RW dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (mitra) untuk pengembangan bisnis bidang usaha LKM-RW yang dimotori oleh Koperasi, meliputi: *branding*, promosi, pemasaran, dan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - i. Membantu LKM-RW dalam menjalin kerjasama dan melaksanakan program – program berbasis *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
 - j. Membantu LKM-RW dalam menghimpun dana swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan;

Pedoman umum pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Rukun Warga (PMB–RW) ini, merupakan pedoman bagi semua pelaku Program PMB-RW di Kota Pekanbaru untuk:

1. Menyamakan pemahaman dan pelaksanaan dilapangan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan kegiatan Program PMB–RW.
2. Pedoman ini akan dilakukan penyempurnaan secara berkala oleh Tim Perumus Program PMB–RW dengan masukan dan saran dari

stakeholders yang ada di Kota Pekanbaru maupun dari pihak lainnya.

3. Untuk petunjuk Teknis akan disusun tersendiri sesuai dengan Tahapan dan Siklus PMB-RW.

Dilihat dari aspek ekonomi produktif diperlukannya partisipasi masyarakat yang merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan dan pengembangannya memerlukan waktu, sumber daya, pemahaman dan ketekunan. Selain itu partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat secara sukarela, selain juga merupakan gambaran dari pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka (*Sumaryadi, 2013; 57*).

Sesuai dengan sasaran PMB RW Kota Pekanbaru ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta pembenahan lingkungan. PMB RW diharapkan mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

5.2.3. Berdasarkan Aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan

Penataan Kawasan dan pemberdayaan lingkungan adalah pendekatan dalam pengelolaan atau manajemen pembangunan lingkungan dimana masyarakat diharapkan memiliki keberdayaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan PMB RW dalam pembangunan lingkungan di sekitar tempat tinggal atau dalam komunitasnya.

Diperlukannya suatu koordinasi dalam penataan kawasan dan lingkungan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru. Koordinasi tersebut merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat koordinasi sudah dilaksanakan dengan matang. Sudah menginformasikan kepada masyarakat, Adapun sub indikator dalam penataan kawasan dan lingkungan yaitu Pembangunan jalan berupa semenisasi dan melakukan pengelolaan sampah dalam lingkungan RW.

Hasil wawancara peneliti dengan Lurah Sidomulyo Barat, Mengenai Pertanyaan tentang koordinasi antara masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Bagaimana koordinasi yang dilaksanakan. Sudah meginformasikan kepada masyarkat, akan tetapi ada kendala dari realisasi anggaran. Bapak Hendry Safitrah, SH, MH , dia mengatakan, bahwa:

“Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan untuk mengetahui bahwa Program PMB-RW berlangsung baik atau tidak dan mempunyai tanggung jawab dari yang diberikan. Pada Program PMB-RW ini memiliki organisasi pelaksana yaitu dari Tim koordinasi Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan”. (wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa koordinasi sudah ada dan berjalan dengan baik, dari rapat yang dilaksanakan tingkat kota Pekanbaru, lalu tingkat Camat, terus turun ke Kelurahan dan LKM-

RW. Tapi tetap saja pelaksanaan kegiatan membutuhkan dana. Dana tersebut direalisasikan pada akhir tahun, dan anggarannya juga terbatas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Pendamping PMB RW Kelurahan Sidomulyo Barat Bapak Ramli Menjelaskan bahwa:

“selain koordinasi, hal terpenting dalam penyampaian materi pelatihan adalah *komunikasi dalam program PMB-RW berjalan dengan baik, dari Sosialisasi RW dan Pelatihan yang berlangsung. Pengajarannya sangat dimengerti. Kalau untuk komunikasi saya rasa bagus-bagus saja.*” (**wawancara tanggal 27 Agustus 2019**)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa koordinasi sudah berjalan dengan baik, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis. Harus melakukan sosialisasi agar masyarakat berpartisipasi dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat. Dalam pelaksanaannya juga adanya komunikasi untuk mendapatkan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh tenaga penadamping.

Ditinjau dari aspek pengembangan penguatan, maka masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bisa dikatakan telah memiliki kesadaran yang cukup baik terkait dengan pembangunan lingkungannya. Pada tahun pertama kegiatan pembangunan lingkungan banyak terfokus kepada penataan jalan

lingkungan berupa gang menjadi jalan aspal. Dengan penataan jalan lingkungan, maka mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan lingkungan terlihat lebih rapi dan tertata. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan di Kelurahan Sidomulyo Barat dilihat dari sisi praktis memang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinilai mampu mengatasi sebagian permasalahan yang selama ini dirasakan, namun untuk membangun sebuah lingkungan komunitas agar benar-benar tertata dan menjadi komunitas yang lebih maju maka diperlukan suatu konsep penataan lingkungan yang terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada staf bagian pemberdayaan kantor Camat Kecamatan Tampan anggaran serta sosialisasi sudah dilakukan terhadap masing-masing ketua Rukun Warga di Kecamatan Tampan. Adapun anggaran yang telah dikeluarkan Oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru yaitu Rp.50 juta per Rukun Warga akan tetapi yang diterima oleh setiap Rukun Warga berjumlah Rp. 45 juta, dan Rp. 5 juta merupakan dana Operasional.

Tabel 5.8
Dana Operasional PMB RW Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

| PROGRAM/ KEGIATAN | KELURAHAN | JUMLAH KEGIATAN | | REALISASI | | JUMLAH ANGGARAN | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | Fisik | Non Fisik | Fisik | Non Fisik | DPA | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Pelatihan- Pelatihan | 1. Simpang Baru | 0 | 9 | 0 | 9 | Rp.233.456.250,- | Rp.233.456.250,- |
| | 2. Tuah Karya | 5 | 12 | 0 | 8 | Rp.435.294.500,- | Rp.228.742.000,- |

| PROGRAM/ KEGIATAN | KELURAHAN | JUMLAH KEGIATAN | | REALISASI | | JUMLAH ANGGARAN | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| | | Fisik | Non Fisik | Fisik | Non Fisik | DPA | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Pengadaan Kontruksi Jalan | 3. Delima | 0 | 7 | 0 | 7 | Rp.187.876.000,- | Rp.187.876.000,- |
| | 4. Sidomulyo Barat | 9 | 12 | 0 | 5 | Rp. 532.500.000,- | Rp.153.625.000,- |
| 3. Pengadaan Kontruksi Jaringan Air | 5. Sialangmunggu | 15 | 9 | 0 | 4 | Rp.604.088.250,- | Rp.156.410.750,- |
| | 6. Tobekgodang | 0 | 10 | 0 | 7 | Rp.235.425.000,- | Rp.174.372.000,- |
| | 7. Airputih | 1 | 7 | 0 | 4 | Rp.199.390.000,- | Rp.108.912.500,- |
| | 8. Binawidya | 2 | 7 | 0 | 4 | Rp.225.390.000,- | Rp.109.412.500,- |
| | 9. Tuahmadani | 0 | 6 | 0 | 6 | Rp.162.578.500,- | Rp.162.578.500,- |

Sumber : Kantor Kecamatan Tampan, 2018.

Adapun program penataan Kawasan dan Lingkungan di Kelurahan Sidomulyo Barat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gotong royong (gerakan peduli bersih)
2. Penghijauan & taman bunga (gerakan hijau berseri)
3. Penyediaan fasilitas publik secara swadaya dan mandiri (gerakan sarana mandiri)
4. Kerjasama (swakelola) dengan SKPD, dalam pelaksanaan infrastruktur lingkungan (semenisasi, saluran, bangunan).

Adapun pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan yaitu : Camat, Lurah, LKM-RW, PKBL/CSR, PKK, Dasawisma, LPMK, RT/RW.

Indikator keberdayaan masyarakat dalam ranah politik adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kendali dan tanggung jawab penuh terhadap setiap pengambilan keputusan dan perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan dalam komunitasnya. Masyarakat di Kecamatan Tampan saat ini bisa dikatakan telah memiliki peran dan posisi tawar yang cukup baik dalam menentukan apa-apa saja yang menyangkut

komunitasnya, hal ini pun didukung oleh pernyataan Lurah yang selalu mendorong agar masyarakat sama-sama belajar untuk bisa secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Selain kepemimpinan dan pengambilan keputusan, aspek politik lainnya adalah menyangkut informasi, jaringan kerja dan akuntabilitas lembaga. Terkait dengan akses informasi dan jaringan kerja dengan pihak luar, belum banyak kegiatan atau program yang dijalankan meskipun sebenarnya terdapat banyak peluang dan kesempatan yang dimungkinkan. Selama ini jaringan kerja yang telah terjalin adalah kerjasama melalui forum PKK baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, namun forum yang terbentuk masih bersifat normatif dan belum menghasilkan keluaran yang nyata dari bentuk kerjasamanya. Peluang-peluang yang selama ini belum dimanfaatkan antara lain kerjasama dengan dunia usaha, kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain serta kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang sifatnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Berbicara mengenai kegiatan lingkungan yaitu gotong royong, timbul pertanyaan tentang masih adakah semangat gotong royong masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat dalam melaksanakan program PMB RW yang salah satunya Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat. Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Ketua RW di

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada bulan Agustus tanggal 27-30 Agustus 2019:

Tabel 5.9
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama
Berdasarkan Aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan

| Indikator 1 | Sub Indikator 2 | Pertanyaan 3 | Hasil Wawancara 4 |
|---------------------------------|---|---|--|
| Penataan Kawasan dan Lingkungan | a. Melakukan pengelolaan sampah dalam lingkungan RW | Menurut Bapak/Ibu, kegiatan lingkungan yaitu gotong royong, timbul pertanyaan tentang masih adakah semangat gotong royong masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat dalam melaksanakan program PMB RW yang salah satunya Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat? | <p>Kegiatan gotong royong bulan bakti ini melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat, kendala yang kami hadapi hanya mengenai penyesuaian waktu bagi masyarakat yang bekerja, karena kalau untuk semangat masyarakat masih antusias untuk kebersamaan. (Bapak Agus Prasetyo Hutomo, S.K, Ketua RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat)</p> <p>Semangat masyarakat RW saya masih antusias, hanya saja sulit mengkoordinir terhadap masyarakat yang bekerja di perkantoran. (Bapak Subagio, Ketua RW 15 Kelurahan Sidomulyo Barat)</p> <p>Masih ada kurang kompak dan kurang semangat pada warga saya, karena sebagian dari masyarakat saya ini adalah yang bekerja di kantor. (Bapak Zainuddin, Ketua RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</p> |
| | b. Pembangunan jalan berupa semenisasi | Menurut Bapak/Ibu, apakah program PMB RW saat ini dilingkungan RW melaksanakan pembangunan jalan atau semenisasi, ataupun drainase air? | Untuk tahun ini di RW saya tidak ada dilakuan pembagunan berupa fisik, hanya berupa pelatihan saja. (Agus Prasetyo Hutomo, S.K, Ketua RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|
| | | | <p><i>Tidak ada pembangunan fisik, saya juga kurang tau, karena pada RKT yang saya tau ada seminisasi jalan di RW saya, tetapi tidak dilaksanakan. (Bapak Subagio, Ketua RW 15 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Sejauh ini sampai dengan bulan agustus tidak ada dilaksanakan pembangunan fisik baik semenisasi ataupun pembuatan drainase. (Bapak Zainuddin, Ketua RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> |

Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Ketua RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampar, dapat dijelaskan bahwa kegiatan gotong royong bulan bakti sangat bermanfaat bagi masyarakat, walaupun ada sebagian masyarakat yang masih tidak ikut dalam melaksanakan kegiatan gotong royong ini, akan tetapi akan dicari solusi dengan cara mencari waktu yang tepat dalam melakukan kegiatan gotong royong tersebut, pihak RW akan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan agar seluruh masyarakat dapat berperan aktif untuk kepentingan bersama. Selanjutnya berbicara mengenai tidak dijalankannya kegiatan Fisik berupa Seminisasi jalan dan Drainase pada setiap RW dalam program PMB RW, Hasil wawancara peneliti dengan Desmardeti, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat, ia menjelaskan:

“untuk tahun 2018 ini, memang kami tidak melakukan pembangunan berbentuk fisik, alasannya dengan anggaran Rp. 25.000.000,- kami takut tidak meratanya pembagunan semenisasi

tiap RW, kurangmya dana pembangunan fisik tersebut akan kami anggaran kembali ditahun berikutnya, selain itu proses pembangunan fisik ini melalui Pengadaan Barang/Jasa pada Tugas Pembantuan PMB-RW dan cukup panjang serta rumit dengan anggaran sekecil itu". (wawancara tanggal 24 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut mengenai pembangunan fisik, bahwa proses diawali dengan Penyedia/pengguna barang/jasa dalam hal ini Kontraktor/Pihak Ketiga dan Kecamatan harus memenuhi etika pelaksanaan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi, Etika Pelaksanaan Kegiatan. Perlu melakukan Koordinasi dengan Koordinator Program PMB-RW beserta jajarannya dalam hal: Penentuan Konsep Dasar PMB-RW dan Penyusunan Rancangan *Grand Strategy* Program PMB–RW.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru ini yang mana Program ini dilaksanakan secara mekanisme pelaksanaan kegiatan PMB-RW di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 dengan menggunakan anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksanaan pelaksana tekni kegiatan, pejabat pengadaan barang/jasa, panitia/pejabat hasil pekerjaan, bendahara pengeluaran, serta LKM-RW selaku kelompok masyarakat. Peneliti memberikan pertanyaan kepada Camat Tampan mengenai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2018 mengenai pelimpahan sebagian kewenangan walikota pekanbaru kepada camat terkait program pemberdayaan masyarakat, sudah sejauh mana program tersebut dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Seperti yang disampaikan oleh Camat Tampan dalam Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Liswarti, dia menjelaskan, bahwa:

“Di Kecamatan Tampan Program PMB RW sudah berjalan dengan maksimal dan memang mungkin masih banyak yang perlu dibenah, berbicara mengenai aturan PMB RW yang ada di Perwako, tentu saja kami berpedoman pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, mungkin ada beberapa hal yang belum kami jalankan sesuai peraturan tersebut dan itu bisa saja karena kebijakan dari pemerintah setempat”. (wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan merupakan pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat mandiri untuk melanjutkan kegiatan proses pembangunan yang berkelanjutan, seperti wawancara peneliti kepada masyarakat/peserta PMB RW yang mengikuti pelatihan sebagai informan utama, sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Masyarakat/ Peserta yang mengikuti pelatihan Program PMB RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Berdasarkan Aspek Penataan Kawasan dan Lingkungan

| Indikator 1 | Pertanyaan 3 | Hasil Wawancara 4 |
|--|---|---|
| Penataan Kawasan dan Lingkungan | <p>Menurut Bapak/Ibu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan, apa yang menjadi kendala bagi peserta/masyarakat untuk keberlanjutan program PMB RW terhadap dirinya sendiri?</p> | <p><i>Program PMB RW ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai warga di kelurahan Sidomulyo Barat, hanya saja untuk melanjutkan hasil dari pelatihan tersebut kami memerlukan dana, dan dana tersebut tidak kami peroleh. (Ibu Susilawati, Warga RW 07 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Bagaimana mau kami lanjutkan kalau modal tidak diberikan, kami mengikuti pelatihan-pelatihan ini untuk menambah wawasan kami saja. (Ibu Lia Septika Putri, Warga RW 08 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Setelah mengikuti berbagai kegiatan PMB RW mengenai pelatihan-pelatihan yang diadakan di kantor kelurahan memang kami mendapatkan ilmu, tapi kalau untuk melanjutkannya tentu memerlukan bantuan dana. (Ibu Nanik Herawati, Warga RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Kami tidak bisa melanjutkan hasil pelatihan yang kami dapat secara mandiri, kalau kami tidak diberikan dana dari pemerintah. (Ibu Sri Yuspa Dewi, Warga RW 01 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> <p><i>Kendala yang ada ya Cuma dana saja, pelatihan yang kami ikuti sangat banyak bermanfaat, tetapi untuk melanjutkan menjadi usaha tentu memerlukan bantuan. (Ibu Juliana, Warga RW 17 Kelurahan Sidomulyo Barat)</i></p> |

Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2019.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat atau peserta yang mengikuti pelatihan pada program PMB RW Kelurahan bahwa dapat dana untuk pelaksanaan Program PMB-RW merupakan dana yang di dapati dari Pemerintah Kota dan hanya untuk mengadakan pelatihan saja, tidak

dibantu dalam meneruskan usaha setelah adanya pelatihan. Langkah pemberdayaan masyarakat telah diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pelatihan, peningkatan kesehatan, tetapi tidak dalam pemberian modal untuk saat ini di kelurahan Sidomulyo Barat.

Perlu diketahui bahwa LKM–RW sudah memiliki Dokumen Data Penduduk dan hasil kajian persoalan masing-masing jiwa penduduk sebagai data sekunder dari profil kelurahan dan data Pemetaan Swadaya PNPM Mandiri Perkotaan/Lembaga lainnya yang selalu di perbaharui setiap 6 bulan sekali oleh pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM–RW), untuk selanjutnya sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan setelah melalui proses musyawarah dengan berbagai SKPD, Badan, Kelurahan, RW/RT. Memastikan LKM – RW dan KPM sudah terbentuk di masing – masing RW yang disahkan oleh Lurah setempat, agar PMB RW dapat berjalan maksimal.

Proses pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasar analisis data di lapangan, berdasarkan uraian hasil penelitian dan pelaksanaan program pemberdayaan berbasis masyarakat rukun warga (PMB RW) dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Karakteristik masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat yang diberdayakan dengan PMB RW ketahui perbedaan karakteristik terhadap kelurahan yang membedakan masyarakat kelurahan yang satu dengan yang lain, bahwa pelaksanaan PMB RW dalam

mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat di kecamatan Tampan dilakukan dengan valid/lengkap secara formal maupun dari proses PMB RW.

2. Segala usaha pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tampan memperoleh dukungan pemimpin baik Camat, Lurah RW, RT maupun semua unsur masyarakat yang terlibat di kecamatan Tampan. Didalam proses PMB RW di Kelurahan Sidomulyo Barat telah menyadarkan masyarakat yang terikat terdapat adat kebiasaan dan serta mendapat jalan keluar masalah dari PMB RW sebagai upaya pemberdayaan masyarakatnya. PMB RW telah Memberdayakan masyarakat di Sidomulyo Barat serta menjadi masyarakat yang mandiri dalam menembangkan usaha sendiri.
3. PMB RW telah memprioritaskan masyarakat untuk membangun untuk menjadi masyarakat mandiri terutama masyarakat yang membutuhkannya. PMB RW telah memberikan kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan masyarakat di kecamatan Tampan dan memenuhi kebutuhannya masyarakat maju. Hasil yang ingin dicapai PMB RW telah membuat masyarakat yang mandiri, masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri.

5.3 Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam penelitian yang peneliti lakukan pada Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat, peneliti dapat bahwasanya Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum dikatakan berhasil. Belum berhasilnya Pelaksanaan Program PMB-RW dikarenakan ada beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik dari pelaksanaan program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat ini. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang peneliti dapatkan dari Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat. Faktor tersebut adalah:

1. Dilihat dari faktor Dana

Sangat minimnya dana yang di realisasikan Pemerintah Kota sehingga Pelaksanaan Program berjalan tidak merata. Dalam Pelaksanaan Program PMB-RW memerlukan dana untuk Pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik.

Selain dari dana Pemerintah Kota, bisa saja dana dari luar, seperti yang disampaikan Camat Tampan dalam Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Liswarti, dia menjelaskan, bahwa:

“sumber dana Program PMBRW sejauh ini masi menggunakan anggaran dari Pemerintah Kota. Tapi dalam juknisnya bisa saja bantuan dana dari luar, misalkan perusahaan-perusahaan swasta yang bertepatan di wilayah Kecamatan Tampan ada perusahaan yang berpartisipasi dan mau meberikan dana terhadap Program

PMB-RW ini, ya kami dari pihak kecamatan tentu akan menerima saja". (wawancara tanggal 21 Agustus 2019)

2. Dilihat dari faktor Tenaga

Tenaga pendamping sangat mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat. Tenaga Pendamping yang dipilih dari kalangan sarjana akan membuat Pelaksanaan Program yang dilakukan menjadi program yang berkualitas yang akan meningkatkan sub-indikator pada indikator pertama yaitu ekonomi, sosial, dan intelektual. sesuai dengan sarjana keahlian mereka masing-masing.

3. Dilihat dari Pikiran/ Ide

Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dipikiran. Pada faktor Ini yang membawa dampak berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dari masyarakat, tenaga pendamping ataupun tokoh masyarakat dan lain-lainnya. Partisipasi berbentuk ide dalam Pelaksanaan Program PMB-RW ini untuk menentukan perencanaan dari Pelaksanaan Program PMB-RW yang nantinya akan dijadikan kegiatan yang prioritas dan memiliki tujuan yang baik dalam pelaksanaan maupun hasil.

3. Dilihat dari Faktor Keadilan

Pada faktor ini sangatlah penting. Karena sebaiknya dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat berjalan sesuai yang membutuhkan. Seharusnya dana yang minim tersebut bisa dikendalikan dan direalisasikan dengan baik oleh Pejabat Pelaksanaan

Teknis Kegiatan (PPTK). Dilihat dari kegunaannya, dan yang membutuhkannya.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani yang dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pada program PMB-RW masyarakat khususnya perempuan lebih memiliki ruang dalam memperoleh akses. Dilihat dari pelatihan yang dilaksanakan yang lebih melibatkan partisipasi perempuan. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain: pelatihan tata boga, menjahit lanjutan dan pelatihan rebana.

Program pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Kartasasmita dalam Mardikanto, 2013:163). Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung pada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya.
2. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat

mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendirisendiri masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

Sedangkan menurut Usman (2003 :40) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dijabarkan pada bab sebelumnya tentang analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dari hasil penelitian penulis pada Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Tampan Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru *cukup terlaksana* tetapi belum maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru yang menjadi dasar pelaksanaan PMB RW, pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan yaitu Kepelatihan. Kegiatan PMB-RW pada prinsipnya merupakan kegiatan pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang dianggarkan melalui instansi terkait dan pendanaannya berasal dari berbagai sumber dilihat dari indikator *aspek sosial dan kependudukan*, bahwa Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan perubahan sosial masyarakat tidak begitu berpengaruh, karena kegiatan dalam Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan hanya Program yang bersifat pembelajaran dasar. Dilihat dari *aspek ekonomi produktif*, bahwa pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Tampan

Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW. Selanjutnya dilihat dari *aspek penataan kawasan dan lingkungan* bahwa program penataan Kawasan dan Lingkungan di Kelurahan Sidomulyo Barat dapat dilihat dari gerakan gotong royong, Penghijauan dan taman bunga (gerakan hijau berseri), akan tetapi untuk Kerjasama (swakelola) dengan SKPD, dalam pelaksanaan infrastruktur lingkungan (semenisasi, saluran, bangunan) pada tahun ini tidak dilaksanakan karena kurangnya dana yang ditentukan. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah didapatkan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW. Akan tampilan/kemampuan tersebut tidak bisa dijadikan pekerjaan karena tidak adanya modal untuk peralatan dan lain sebagainya dalam membuat lapangan pekerjaan. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Pelaksanaan Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan.

2. Adapun Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat yaitu Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi Pelaksanaan sehingga partisipasi

tenaga pendamping dan ide gagasan berjalan sesuai keinginan masyarakat. Sehingga berlangsungnya keadilan dalam Pelaksanaan Program PMB-RW.

6.2 Saran

Dilihat dari hasil analisis penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba merekomendasikan saran yang dapat dijadikan masukan mengenai tentang analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Bagi pemerintah khususnya di kecamatan Tampan terhadap PMB RW supaya segera lebih aktif dalam menjalankan pemberdayaan masyarakatnya dengan memberikan pelatihan maupun pembangunan fisik secara maksimal sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata. Tenaga pendamping menurut saya harus sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, misalkan untuk budi daya perikanan yaitu dari sarjana perikanan, dan perbengkelan dari sarjana teknik. Sehingga kegiatan berjalan dengan baik.
2. Melihat dari pelaksanaan PMB-RW ini pada kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan pada pelatihan PMB-RW ini tidak merata masyarakat mendapatkan program ini, sebaiknya untuk pelaksanaan PMB-RW ini harus sama rata semua RW mendapatkan program pelatihan PMB-RW ini, agar ketika

pelaksanaan program PMB-RW lebih efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah dibuat.

3. Pemerintah kota sebaiknya mengeluarkan anggaran dana yang besar agar kegiatan yang sudah direncanakan terlaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Program PMB-RW yaitu peningkatan ekonomi, sosial dan intelektual masyarakat yang mengikuti pelatihan Program PMB-RW tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afiffudin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Agus, Erwan. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anwas, Oos M. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Aprilia, Theresia, dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta. Bandung.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajah Mada Yogyakarta, University Press.
- Frank Teroriero, Jim IFE. 2006. *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hamdi Muhclis. 2013. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, Soewarno 2003. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Isbandi Rukminto, 2003, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Jones, Charles O. 1994, *Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan Ricky Istamto*, Jakarta: Roja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremis T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- Mardikanto, Totok. Dan Poerwoko Soebito. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Masri Singarimbun. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudiyono, dkk. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press. Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung.
- Rasyid, 2000, *Tugas-Tugas Pokok Pemerintah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rizky Argama, 2007, *Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Pembangunan*, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setiana, Lucie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2014, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

- Syafii Inu Kencana. 2003. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2006. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.
- Tachjan., 2006., *Implementasi Kebijakan Publik.*, Bandung: AIPI
- Thoha, Miftah, 2008, *Birokrasi dan Politik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulbert Silalahi. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Ulbert Silalahi, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Usman Sunyoto, 2004. *Pembangunan dan Penguatan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Winarno Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi&Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yuosa, 2002, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan manajemen*, Pekanbaru, Uir Press.
- Zubaedi. 2012. *Pengembangan Masyarakat (Wacana&Praktik)*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.

B. PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Peraturan Mendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 19 tahun 2012 tentang RPJM Pekanbaru.

Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Pekanbaru Kepada Camat Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukuk Warga.

Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 39 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Kota Pekanbaru.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis.

C. JURNAL

Agus Sujono, 2008. *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. LPD-PA UNIBRAW.

Dadang Mashur, 2016, *Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) Di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis*, (Perpustakaan Universitas Riau).

Erniyati, 2012, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat*, (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta).

- Leviana, 2014, *Pemberdayaan masyarakat berbasis pada komunitas RW: studi tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) di Kelurahan Bintaro-Jakarta Selatan*, (Universitas Indonesia Library).
- Pujyati, 2017, *Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir*, (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau).
- Sri Wahyuni, 2018, *Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kota Pekanbaru*, (JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018).
- Talgia, 2017, *Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Di Kota Pekanbaru*, (Jurnal Renaissance | Volume 2 No. 02 | Agustus 2017).

